

**KASUS PEMERKOSAAN DAN SANKSI HUKUMNYA  
( STUDI DI PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SHI)**



**OLEH**

**ANDI SURYA WINATA**

**NIM : 10524001116**

**PROGRAM S1  
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2010**

## ABSTRAK

### KASUS PEMERKOSAAN DAN SANKSI HUKUMNYA ( Studi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam )

Kejahatan perkosaan merupakan perbuatan yang sangat tercela bahkan semakin keji, yang mana perbuatan itu terjadi mengakibatkan penggeseran - penggeseran terhadap nilai-nilai perbuatan yang merupakan gejala sosial. Dari segi yuridis merupakan jenis kejahatan yang sudah ditentukan dalam ketentuan undang - undang, bahwa perbuatan jenis-jenis tertentu dianggap suatu kejahatan. korban yang didominasi oleh kaum wanita dari berbagai golongan usia dan profesi secara alami melahirkan anggapan bahwa pria lebih dominant disbanding kaum perempuan.

Hal yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan di Rokan Hilir, untuk mengetahui sejauh mana upaya Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menegakkan hukum dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kasus perkosaan ini.

Mengenai tujuan penelitian ini adalah untuk memahami apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya perkosaan di wilayah hukum Rokan Hilir, dan untuk mengetahui sejauh mana upaya yang dilakukan aparat penegak hukum di wilayah hukum Rokan Hilir untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan perkosaan yang terjadi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif analitik, sebagai data primer penulisan ini dalah berasal dari para hakim yang memutuskan kasus perkosaan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tahun 2007-2008 sedangkan data skundernya berasal dari korban dan pelaku perkosaan serta buku-buku atau dokumen yang ada korelasinya dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara struktur dan non struktur kepada responden yaitu tim penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, hakim dan lembaga pemasyarakatan, observasi yaitu penulis langsung meninjau ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

Setelah melakukan penelitian penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut : faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perkosaan diantaranya adalah faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, sosial, budaya, kelainan seks, kenakalan remaja, serta putusan hakim yang tidak tegas. Sedangkan upaya yang dilakukan hakim dalam menegakkan hukum terhadap kasus perkosaan adalah berpangkal pada system, menegakkan integritas hakim, menentukan jenis delik, pembuktian terhadap kasus, melakukan uji porsensik atau visum, memeriksa korban serta memberikan putusan yang tegas kepada terdakwa.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam, putusan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pidana perkosaan memberikan hukuman yang pada prinsipnya tidak efektif. Sebab dalam pidana Islam tujuan dari hukuman adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besar kecilnya hukuman itu harus sedemikian rupa, tidak boleh lebih atau kurang dari batas yang telah ditentukan dan dengan demikian terdapat prinsip keadilan menjatuhkan hukuman

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>NOTA PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>ABSTRAK .....</b>	iv
<b>DAFTAR ISI .....</b>	v
 <b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan .....	15
 <b>BAB II      GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Keadaan Alam .....	17
B. Penduduk .....	18
C. Perekonomian .....	19
D. Pemerintahan .....	21
E. Keadaan Kriminalitas di Rokan Hilir.....	22
 <b>BAB III      TINJAUAN UMUM KEJAHATAN KESUSILAAN....</b>	
A. Gambaran Umum Kejahatan Kesusilaan .....	26
B. Pengertian Delik .....	42

	C. Macam-Macam Alat Bukti .....	47
	D. Beberapa Kasus Perkosaan di PN Rokan Hilir .....	49
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN</b>	
	A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kesusilaan di Rokan Hilir .....	61
	B. Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Perkosaan Oleh PN Rokan Hilir .....	72
	C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Perkosaan .....	84
	D. Analisa Penulis .....	91
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	98
	B. Saran .....	99
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	100
	<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Persepsi masyarakat tentang kejahatan kesusilaan digambarkan bahwa pelaku dengan korban umumnya adalah wanita dan anak – anak, yang terlebih dahulu didahului oleh suatu kontak. Hal ini sering memancing pro dan kontra tentang siapa yang menjadi korban dan siapa yang menjadi pelaku dari suatu kejahatan.<sup>1</sup>

Pola kehidupan sosial budaya pada hakekatnya tanpa disadari sedikit banyaknya dapat berpengaruh pada pola tingkah laku seseorang dalam kehidupan masyarakat, secara alami ada anggapan bahwa kaum pria lebih dominan dari pada kaum perempuan, hal ini semakin mendorong budaya kekerasan sebagai jalan keluar dan sasaran terdekatnya adalah perempuan. Kelainan pada psikopat pada diri pribadi seseorang dari segi sisi kejiwaan, mempunyai kaitannya dengan masalah lawan jenis diluar kehidupan seseorang.<sup>2</sup>

Gejala budaya asing secara umum dapat terlihat pada adanya kecendrungan dari kaum wanita ( remaja puteri ) mengikuti perubahan budaya kebarat - baratan untuk memakai pakaian ketat, baju transparan, memakai rok mini, menggunakan busana belahan dada terbuka, memakai perhiasan yang

---

<sup>1</sup> Adam Ghazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005 ), Hal 5.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal 7

mencolok, semuanya itu merupakan pemandangan yang cukup sering kita jumpai baik di pasar – pasar tradinasional, swalayan maupun tempat – tempat umum lainnya. Seni tari misalnya meskipun memuat tarian – tarian erotik tampaknya semakin diterima oleh masyarakat sebagai tontonan atau hiburan.

Selain itu, karena tubuh wanita diciptakan dalam bentuk yang lebih menarik dari pada pria maka gerakan tubuh wanita yang sensual, seperti berjoget (goyang ngebor, vebrator, dll), berjalan dengan lenggak-lenggok, berparfum dengan maksud menarik birahi lawan jenisnya termasuk perbuatan yang diharamkan dalam ajaran agama Islam.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

“Setiap wanita yang memakai wewangian, kemudian melewati suatu kaum agar mereka mencium aroma wanginya, berarti ia telah berzina.”

(HR. Ahmad, An-Nasa’i, Abu Daud, dan Tirmidzi).<sup>3</sup>

Islam mensyari'atkan adanya kehidupan khusus (kehidupan keluarga) dan kehidupan umum (kehidupan sosial). Di dalam kehidupan khusus Islam membolehkan bagi wanita menampakkan bagian anggota tubuhnya dihadapan anggota keluarga (muhrim). Seorang wanita muslimah diboleh membuka jilbab dan kerudungnya di hadapan para mahramnya dan orang-orang lain yang diberi hak oleh syariat untuk melihat bagian aurat yang biasa terlihat manakala wanita itu ada di dalam rumah. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nuur Ayat 30-31 :

---

<sup>3</sup> Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hal 87.

يَصْنَعُونَ قُلُوبَ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا

Artinya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ  
مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَلَمْنَ

Artinya :

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka..."<sup>4</sup>

Unsur pemaksaan dalam tindak kejahatan, diperbincangkan dalam fiqh jinayah sebagai unsur yang bisa meringankan atau melepaskan korban yang dipaksa dari jeratan hukum. Tetapi, unsur tersebut tidak banyak diperbincangkan sebagai unsur pemberat terhadap ancaman hukuman suatu tindak kejahatan bagi pelaku. Apalagi menjadikannya tindakan kejahatan tersendiri, misalnya dalam kasus perkosaan.

Menurut bahasa jarimah/jinayat berarti segala sesuatu yang harus dihindari oleh setiap orang dari segala bentuk kejahatan dan usaha yang mengarah pada kejahatan. Adapun menurut istilah fiqh, jinayat berarti suatu

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, PT Syaamil Cipta Media.

nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara' baik yang menyangkut terhadap jiwa, harta benda dan lain-lainnya.<sup>5</sup>

Hukum dalam Islam tidak hanya berfungsi untuk mendapatkan keadilan, tapi juga bermanfaat bagi proses pendidikan. Di dalam hukum Islam terkandung nilai-nilai edukatif yang sangat tinggi. Itulah sebabnya dalam proses hukum, selalu melibatkan masyarakat, termasuk dalam pemberian sanksi hukum.

Kesadaran akan adanya kesatuan kepentingan, akan adanya kesatuan pandangan dan tujuan perlu diwujudkan dan dijadikan landasan utama sebagai pendorong dalam menanggulangi masalah kejahatan. Oleh karena itu pola penanggulangan harus lebih ditekankan pada tindakan pencegahan ( preventive ) pada pihak korban.

Dalam kehidupan masyarakat yang serba praktis sekarang ini, keinginan manusia hampir semua hal ingin didapat dengan cara – cara praktis, disamping itu manusia juga sebagai mahluk sosial memiliki kekurangan – kekurangannya.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan masyarakat yang bersifat dinamis, maka tindakannyapun harus dinamis pula sesuai dengan irama perubahan masyarakat, dengan demikian pengertian dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat.

---

<sup>5</sup> M. Nashir Cholis, *Fiqih Jinayat (Pidana Islam)*. (Pekanbaru: Susqa Pers 2000), Hal 1.

<sup>6</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Social Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1997 ), Hal 19.



Teori-teori dari perspektif Biologis dan Psikologis sama-sama memiliki asumsi bahwa tingkah laku kriminal disebabkan oleh beberapa kondisi fisik dan mental yang mendasari yang memisahkan penjahat dan bukan penjahat. Mencari, mencoba mengidentifikasi “macam manusia” mana yang menjadi penjahat dan mana yang bukan. Teori-teori tersebut menjelajah pada kasus-kasus individu, tetapi tidak menjelaskan mengapa angka kejahatan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain, antara satu kelompok dengan kelompok lain, di dalam satu wilayah yang luas, atau di dalam kelompok-kelompok individual.<sup>7</sup>

Oleh karena kejahatan merupakan gejala sosial, apabila dipandang dari sudut sosiologis, sangat tergantung pada masyarakat dan kondisi dalam suatu masyarakat tersebut, yang mana perbuatan itu terjadi mengakibatkan penggeseran - penggeseran terhadap nilai - nilai perbuatan yang merupakan gejala sosial. Tetapi ditinjau dari segi yuridis merupakan jenis kejahatan yang sudah ditentukan dalam ketentuan undang - undang, bahwa perbuatan jenis – jenis tertentu dianggap suatu kejahatan.

Pelanggaran/kejahatan kesusilaan yang sering terjadi antara lain : pencabulan, perkosaan, zina, dan pelecehan seksual terhadap wanita atau anak – anak dibawah umur, seperti menunjukkan alat kelaminnya kepada calon korbannya, memegang payudara korban, mengajak korban untuk berbuat mesum dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal 57.

<sup>8</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prefensinya*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1996 ), Hal 16.

Dilihat dari dampak yang ditimbulkan dari kejahatan kesusilaan tersebut para korban secara langsung atau tidak langsung ada yang mengalami stress maupun rasa sakit pada fisik dan beban mental bagi korban bisa juga menjadi trauma berkepanjangan baik terhadap lawan jenis, pada tempat – tempat tertentu, bentuk – bentuk pekerjaan yang pada situasi kondisi dimana korban mengalami peristiwa kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Apabila kita berbicara mengenai korban kejahatan/kriminal maka mau tidak mau kita mesti memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan. Korban mempunyai peranan yang sangat fungsional dalam suatu kejahatan, kenyataannya dapat dikatakan terkadang timbul suatu kejahatan karena diundang oleh korban kejahatan.

Dalam KUHP yang mengatur tentang kejahatan perkosaan secara garis besar memuat unsur – unsur sebagai berikut :

1. Unsur bertentangan dengan kehendak perempuan
2. Unsur tanpa adanya persetujuan perempuan
3. Unsur dengan persetujuan korban tetapi persetujuan tersebut dicapai dengan ancaman.<sup>10</sup>

Dari data sementara yang penulis dapat dari kantor polres rokan hilir pada tahun 2006 tercatat 5 kasus pemerkosaan, sedangkan pada tahun 2007 hingga akhir tahun 2008, tercatat jumlah kejahatan 26 kasus yang berhubungan dengan kejahatan kesusilaan, jika dirincikan maka terdapat 8

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hal 17

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hal, 123.

kasus pemerkosaan, 14 kasus pelecehan seksual dan 4 kasus zina.<sup>11</sup> Dari delapan kasus pemerkosaan yang ada, diantaranya modus kejahatan berawal dari perampokan yang disertai pemerkosaan dan pembunuhan, sedangkan selebihnya dibawah ancaman.

Dalam kasus pelecehan seksual dan kasus zina yang terjadi, para tersangka/terdakwa mayoritas beralasan karena melihat korban berbusana seksi dalam kesehariannya sehingga memancing birahi tersangka/terdakwa. Akan tetapi ada juga karena kesalahpahaman atau ketidak sengajaan kedua belah pihak, misalnya kasus yang terjadi di angkutan desa karena korban merasa dipermalukan pelaku, sehingga korban melaporkan kejadian ini sebagai tindak pelecehan, padahal pelaku tidak dengan sengaja tangan kanannya menyentuh bagian payudara korban yang terbuka karena model busana yang dipakai korban ketika tersangka hendak turun dari angkutan desa tersebut.

Akhir – akhir ini tingkat kejahatan yang menimpa kaum wanita sebagai korban kejahatan semakin meningkat. Jenis kejahatan itu bukan saja kejahatan yang mengakibatkan kerugian materil seperti halnya perampokan, akan tetapi yang lebih dominan saat sekarang ini ialah kekerasan dan pelecehan seksual serta perkosaan.

Dalam beberapa kasus yang ada di pengadilan negeri rokan hilir sebagian besar hakim hanya menjatukan hukuman bagi pelaku perkosaan dengan hukuman yang tidak terlalu berat, hanya 1 sampai 6 tahun saja. Hal ini

---

<sup>11</sup>Sutiono, *Wakapolres Rokan Hilir*, Wawancara, Rabu 24 Desember 2008.

sangat tidak sebanding dengan penderitaan yang dirasakan oleh korban perkosaan yang menanggung akibatnya sampai seumur hidup.

Contoh kasus pemerkosaan dengan **Nomor.330/pid.B/2007/PN.RHL.**

#### Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ismail als. Atung Bin Syamsudin  
Tempat Lahir : Kubu, Kabupaten Rokan Hilir  
Tgl Lahir : 21 Maret 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Parit Kabir, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan  
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Akibat perbuatan terdakwa, ia dituntut jaksa penuntut umum melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

- Dakwaan primair melanggar pasal 82 UU RI No.32 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan subsidair melanggar pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.
- Perbuatan terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh *visum et repertum*, yang menyebabkan luka robek pada selaput darah.

Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : ismail als atung bin syamsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- Menjatuhkan pidana penjara 3 tahun 6 bulan
- Menetapkan masa penahanan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).

Kejahatan seksual seperti sebuah wabah yang tak bisa diatasi sehingga dari tahun ke tahun bukannya semakin berkurang melainkan semakin meningkat dan bertambah bahkan semakin keji malah diperparah oleh supermasi hukum yang kurang pada tempatnya, misalkan dalam kasus pemerkosaan, dalam KUHP Pasal 285.<sup>12</sup> “ barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun“, dalam pasal tersebut telah diatur sedemikian rupa sangsinya dan jika sampai mengakibatkan kematian maka akan diancam penjara maksimal 15 tahun.

Pada prakteknya menurut Laden Marpaung selama ini belum pernah ada yang sampai dijatuhi vonis selama itu, bahkan tidak jarang ada yang hukumannya hanya percobaan saja.

---

<sup>12</sup> R. Soenarto Soedibroto, *KUHP dan KUHPA*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal 173.

Mengacu pada delik pemerkosaan yang terdapat dalam pasal 285 KUHP di atas, tampak bahwa untuk kejahatan pemerkosaan harus memenuhi syarat mutlak berupa paksaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya. Akan tetapi dilihat dari kenyataan dewasa ini, perkembangan tindak pidana pemerkosaan yang ada sudah dilakukan dengan berbagai macam motif atau cara sehingga terkesan bahwa pemerkosaan itu bukanlah karena paksaan atau ancaman kekerasan semata sebagaimana yang tercantum dalam pasal 285 KUHP tersebut, hal ini karena pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat dari sikap dan tindakannya itu sendiri.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi kepada kejahatan yang berhubungan dengan tindak pidana perkosaan. Berdasarkan uraian singkat diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam lagi melalui penelitian hukum yang berjudul : **“Kasus Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumnya ( studi pengadilan negeri rokan hilir dalam perspektif hukum islam)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah bekisar tentang **“Kejahatan Pemerkosaan dan Sanksi Hukumnya Di Rokan Hilir Dalam Perspektif Hukum ( studi pengadilan negeri rokan hilir dalam perspektif hukum islam)”**.

---

<sup>13</sup> Ninik Widiyanti dan Panji Anorega, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologis Dan Sosial*, (Jakarta: Pradnya Paramita,1987) hal, 63.

### **C. Rumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam penulisan proposal skripsi ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya kejahatan perkosaan di Rokan Hilir?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum oleh pengadilan negeri (PN) mengenai kejahatan perkosaan di Rokan Hilir?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap kejahatan perkosaan?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui bagaimana penyebab (motif) terjadinya kejahatan pemerkosaan di Rokan Hilir.
- b) Untuk mengetahui penerapan sanksi hukumnya terhadap kejahatan pemerkosaan di Rokan Hilir.
- c) Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kejahatan pemerkosaan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

- a) Diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi penulis dalam bidang hukum pidana khususnya mengenai pemerkosaan dan sanksinya terhadap kejahatan kesusilaan di Rokan Hilir.

- b) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada segenap pembaca sebagai penambah wawasan di bidang hukum maupun pihak - pihak terkait dalam memecahkan masalah kejahatan kesusilaan.
- c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya terutama yang berkaitan dengan kejahatan kesusilaan.
- d) Untuk memenuhi dan melengkapi syarat mencapai gelar sarjana (S1) Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

## **E. Metode Penelitian.**

### **1. Lokasi Penelitian**

lokasi penelitian ini mengambil lokasi pada Pengadilan Negeri (PN) Bagan Siapi – Api Jln. Pahlawan No. 33, Rokan Hilir Provinsi Riau. Rokan Hilir merupakan kabupaten yang sangat luas yang didiami dari berbagai macam suku terdiri dari suku melayu, jawa, tionghoa, juga batak. Hal yang mendasar bagi penulis untuk melakukan penelitian ini dikarenakan daerah ini merupakan daerah yang sedang berkembang pesat terutama secara fisik, serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, daerah ini juga sangat potensial untuk didatangi berbagai macam latar belakang penduduk yang otomatis hal ini akan menimbulkan berbagai gejala sosial, ekonomi, budaya termasuk kejahatan.



## **2. Subyek dan Obyek Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah para hakim dan jaksa yang telah memutuskan perkara tindak pidana perkosaan di Rokan Hilir. Dan yang menjadi obyek penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ditinjau dalam pespektif hukum islam.

## **3. Populasi dan Sampel**

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah kasus-kasus perkosaan pada tahun 2007-2008 sebanyak 8 kasus perkosaan, dari 8 kasus tersebut 4 kasus penulis jadikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini juga melibatkan sejumlah kalangan terdiri dari :

- a) Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir
- b) Kejaksaan Negeri Rokan Hilir
- c) Tim penyidik kepolisian 2 orang
- d) Pelaku tindak pidana perkosaan 4 orang
- e) Korban tindak pidana perkosaan 4 orang

## **4. Sumber Data.**

Dalam tahap ini penulis mencoba mengklasifikasikan sumber data menjadi dua sumber:

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang dijadikan responden dalam penelitian skripsi ini.
2. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dan literature yang ditulis oleh para ahli dan arsip-arsip Pengadilan Negeri Rokan

Hilir serta buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang bersifat mendukung.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

- 1) Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.
- 2) Wawancara, metode wawancara dapat pula dibedakan dalam wawancara terstruktur dan non struktur. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Sedangkan wawancara non struktur adalah metode wawancara dimana pewawancara bebas menanyakan suatu hal kepada responden tanpa terkait dengan daftar pertanyaan.
- 3) Studi dokumen, yaitu dokumen – dokumen atau bahan bacaan yang dapat diperoleh dari lapangan misalnya dokumen atau bahan bacaan yang terdapat di Pengadilan Negeri (PN) Rokan Hilir.
- 4) Kajian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data melalui buku – buku, kamus maupun peraturan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

## **6. Metode Analisa Data**

Dalam penelitian ini metode analisa data yang dipergunakan ialah metode deskriptif analitik, yakni dengan cara mengemukakan dan menggambarkan data secara tepat, serta apa adanya berdasarkan data yang

diperoleh. Selanjutnya dilakukan pembahasan dengan cara penulisan data dengan dihubungkan teori - teori serta ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian, selanjutnya tarik kesimpulan secara indukatif.

## **7. Metode Penulisan**

Setelah data-data dianalisa, maka data tersebut penulis susun dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang umum berhubungan dengan objek penelitian, yang selanjutnya disimpulkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.
- b. Induktif, pembahasan dengan mengumpulkan data-data yang bersifat khusus, lalu diuraikan dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif, pembahasan dengan membandingkan sumber hukum yang satu dengan sumber hokum yang lainnya, kemudian dianalisa dengan memberikan komentar.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan serta penyusunan, penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yang yang tiap-tiap subnya terdiri dari sub-sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

**BAB I. Pendahuluan :** Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode dan Teknik Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II. Tinjauan umum lokasi penelitian :** gambaran umum tentang keadaan alam kabupaten rokan hilir, penduduk, perekonomian, pemerintahan, keadaan kriminalitas di rokan hilir

**BAB III. Tinjauan umum kejahatan kesusilaan :** gambaran umum kejahatan kesusilaan, pengertian delik, macam-macam alat bukti, beberapa kasus perkosaan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.

**BAB IV. Pembahasan :** faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan di rokan hilir, upaya penegakan hukum kejahatan perkosaan oleh pengadilan negeri Rokan Hilir, pandangan hukum Islam terhadap kejahatan kesusilaan.

**BAB V. Penutup :** kesimpulan, dan saran.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Keadaan Alam**

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra antara 1° 14' – 2° 30' LU dan 100° 16' – 101° 21' BT. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881,59 Km<sup>2</sup> atau sekitar 10,92 persen dari luas Propinsi Riau, dengan Kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah 198,39 Km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

Kabupaten Rokan Hilir memiliki 13 kecamatan diantaranya :

1. Kecamatan Tanah Putih, dengan luas Wilayah 1.915,23 Km<sup>2</sup>.
2. Kecamatan Pujud, dengan luas Wilayah 984,90 Km<sup>2</sup>.
3. Kecamatan Tanjung Melawan, dengan luas Wilayah 198,39 Km<sup>2</sup>.
4. Kecamatan Rantau Kopar, dengan luas Wilayah 213,13 Km<sup>2</sup>.
5. Kecamatan Bagan Sinembah, dengan luas Wilayah 847,35 Km<sup>2</sup>.
6. Kecamatan Simpang Kanan, dengan luas Wilayah 445,55 Km<sup>2</sup>.
7. Kecamatan Kubu, dengan luas Wilayah 1.061,06 Km<sup>2</sup>.
8. Kecamatan Pasir Limau Kapas, dengan luas Wilayah 669,63 Km<sup>2</sup>.
9. Kecamatan Bangko, dengan luas Wilayah 940,56 Km<sup>2</sup>.
10. Kecamatan Sinaboi, dengan luas Wilayah 335,48 Km<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam angka 2008.

11. Kecamatan Batu Hampar, dengan luas Wilayah 284,31 Km<sup>2</sup>.
12. Kecamatan Rimba Melintang, dengan luas Wilayah 235,48 Km<sup>2</sup>.
13. Kecamatan Bangko Pusako, dengan luas Wilayah 732,52 Km<sup>2</sup>.

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-bats wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara :

Propinsi Sumatra Utara dan Selat Malaka

Sebelah Selatan :

Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu

Sebelah Timur :

Kota Dumai

Sebelah Barat :

Propinsi Sumatra Utara.

Dalam wilayah Kabupaten Rokan Hilir terdapat 16 sungai yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai kedaerah hulu sungai. Diantara sungai-sungai tersebut yang sangat penting sebagai sarana perhubungan utama dalam perekonomian penduduk adalah sungai rokan dengan panjang 350 Km<sup>2</sup>.

## **B. Penduduk**

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2008 adalah 538.426 jiwa. Dengan penduduk yang memiliki suku melayu, tionghoa, jawa, batak, bugis dan lain sebagainya. Dengan laju pertumbuhan penduduk 5,4 persen pertahun, sedangkan sex ratio-nya adalah 99,61 yang artinya dari 99 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Sex ratio kecamatan Rimba

Melintang adalah 123,21 berarti dari 123 penduduk laki-laki di Rimba Melintang terdapat 100 penduduk perempuan. Kecamatan Kubu memiliki sex ratio yang terendah yaitu 85,12.

Kepadatan penduduk per kilometer menunjukkan bahwa Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi yaitu 155 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kecamatan Batu Hampar menempati urutan terendah yaitu 23 jiwa per kilometer persegi, jumlah penduduk Kecamatan Bagan Sinembah menempati urutan tertinggi yaitu 130.921 jiwa, kemudian Kecamatan Bangko 90.729 jiwa, Kecamatan Tanah Putih 48.801 jiwa dan Kecamatan Batu Hampar memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu 6.667 jiwa.

Penyebaran penduduk Kecamatan Bagan Sinembah yang luas wilayahnya mencapai 9,54 persen dari luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir menampung 24,32 persen penduduk, sedangkan Kecamatan Tanah Putih yang luas wilayahnya mencapai 21,77 persen menampung 9,06 persen penduduk. Penyebaran penduduk yang tidak merata ini akan menimbulkan masalah kependudukan, kondisi yang kurang sehat bagi kegiatan ekonomi, pertahanan keamanan dan keadilan sosial lainnya.<sup>2</sup>

### **C. Perekonomian**

Salah satu manfaat data Produk Domestic Regional (PDRB) adalah untuk mengetahui tingkat aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di daerah tertentu.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Secara makro perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir selama kurun waktu 2006 – 2008 baik di atas dasar harga berlaku maupun atas dasar konstan 2000 sudah mulai memperlihatkan perkembangan yang cukup baik. Besarnya PDRB atas dasar harga berlaku 7.984,03 milyar rupiah pada tahun 2006, 9.831,65 milyar rupiah pada tahun 2006 kemudian meningkat menjadi 12.006,53 milyar rupiah pada tahun 2008. demikian halnya atas dasar harga konstan 2000 cenderung meningkat dengan baik dari tahun 2006 sampai tahun 2008.

Untuk mengetahui sejauh mana peningkatan kinerja perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat dan dianalisis berdasarkan perkembangan indikator ekonomi antara lain : laju pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektoral, dan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) perkapita serta pendapatan perkapita penduduk daerah ini.

Besarnya laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama periode 2006 – 2008 cukup mengembirakan, kinerja ekonomi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 mengalami peningkatan yang cukup berarti dengan laju pertumbuhan 8,07 persen, 7,95 persen dan 7,88 persen. secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir dari tahun 2006 hingga tahun 2008 adalah sebesar 7,96 persen pertahun.<sup>3</sup>

Untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya pendapatan perkapita (Pendapatan Regional

---

<sup>3</sup> *Ibid*



Perkapita) yang diperoleh dari pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan regional perkapita merupakan gambaran pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi. Pendapatan perkapita mengalami penurunan dari tahun 2007 ke tahun 2008. dilihat dari pendapatan perkapita atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2006 sebesar 6,641 juta rupiah menjadi 5,916 juta rupiah pada tahun 2007 atau terjadi penurunan sebesar 10,9 persen, dan tahun 2008 hanya tercatat sebesar 5,913 juta rupiah.

Secara garis besar pendapatan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir berasal dari perkebunan sawit masyarakat, perkebunan karet masyarakat, persawahan dan hasil laut. Mayoritas penduduk rokan hilir adalah sebagai petani, nelayan dan pengusaha.

#### **D. Pemerintahan**

Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Bupati Rokan Hilir adalah H. Anas Ma'amun dengan Wakil Bupati Suyatno.

Bupati sebagai kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan daerah kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana

pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari tiga belas kecamatan yaitu: Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih, Tanjung Melawan, Rantau Kopar, bagan sinembah, simpang kanan, kubu, pasir limau kapas, bangko, sinaboi, batu hampar, rimba melintang, dan bangko pusako.

#### **E. Keadaan Kriminalitas Di Rokan Hilir.**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam realitas yang ada kejahatan merupakan kenyataan yang tak mudah untuk dipahami.

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad yang lalu telah dipikirkan oleh para ilmuwan, yang menyatakan bahwasanya kekayaan dan kemiskinan merupakan salah satu factor terjadinya kejahatan yang timbul dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Oleh karena kejahatan merupakan gejala sosial, apabila dipandang dari sudut sosiologis, sangat tergantung pada masyarakat dan kondisi dalam suatu

---

<sup>4</sup> Topo Santoso, *Kriminologi*, ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ) Hal 1.

masyarakat tersebut, yang mana perbuatan itu terjadi mengakibatkan penggeseran - penggeseran terhadap nilai - nilai perbuatan yang merupakan gejala sosial. Tetapi ditinjau dari segi yuridis merupakan jenis kejahatan yang sudah ditentukan dalam ketentuan undang - undang, bahwa perbuatan jenis – jenis tertentu dianggap suatu kejahatan.

Permasalahan, perselisihan serta pelanggaran yang sering kita jumpai sekarang ini bukanlah suatu hal yang baru, apakah itu dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Dimana kejahatan-kejahat itu sudah ada atau dikenal semenjak adanya kehidupan manusia di muka bumi ini. Namun usaha-usaha yang dilakukan untuk meminimalisir angka kejahatan belum dapat terlaksana dengan baik, meskipun pengetahuan tentang ilmu kriminologi sekarang cukup maju, akan tetapi belum memungkinkan untuk menghilangkan kejahatan yang ada.

Kabupaten Rokan Hilir juga tidak terlepas terhadap kejahatan atau pelanggaran norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana halnya kejahatan-kejahatan yang terjadi di daerah lainnya. Aparat penegak hukum adalah fungsi yang sangat penting dalam pengendalian kejahatan-kejahatan yang ada.

Pihak kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum dan sebagai unsure paling utama dalam proses penanggulangan maupun pertolongan pertama kepada masyarakat, aparat kepolisian juga melakukan penanggulangan dengan mengambil tindakan yang bersifat preventif maupun represif.

Tindakan yang bersifat preventif dapat berupa menggalakkan patroli, mendirikan pos-pos jaga di setiap daerah yang dianggap rawan terhadap suatu kejahatan, sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya yang kemungkinan terjadi di wilayah tertentu. Sedangkan tindakan yang bersifat represif adalah berupa tindakan-tindakan peradilan seperti : mengumpulkan bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan suatu perkara pidana dan berusaha mengidentifikasi pelaku kejahatan, melakukan penahanan untuk kemudian akan diserahkan kepada pihak kejaksaan yang selanjutnya akan diteruskan di pengadilan.

Sebagai aparat penegak hukum Polres Rokan Hilir dalam menerima laporan dari masyarakat atau menerima pengaduan dari masyarakat, sudah barang tentu merupakan kewajiban baginya untuk menyelesaikan suatu perkara yang telah diketahuinya.

Dalam usaha menanggulangi kejahatan yang ada, maka aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan merupakan pranata sosial yang melaksanakan fungsi penegakan hukum, pada sisilain polri juga tidak terlepas dari hubungan kerjasama kepada masyarakat dalam mencegah dan menggulangi kejahatan. Kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum dalam mengemban tugasnya harus memiliki keterampilan khusus dengan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada guna terjapainya keadilan dalam penegakan hukum.

Berikut banyaknya kejahatan yang ada Polres Rokan Hilir<sup>5</sup> :

1. Tahun 2003 jumlah kasus 339 telah diselesaikan 172 sisa 167 kasus
2. Tahun 2004 jumlah kasus 267 telah diselesaikan 137 sisa 130 kasus
3. Tahun 2005 jumlah kasus 395 telah diselesaikan 228 sisa 167 kasus
4. Tahun 2006 jumlah kasus 766 telah diselesaikan 386 sisa 380 kasus
5. Tahun 2007 jumlah kasus 729 telah diselesaikan 382 sisa 347 kasus
6. Tahun 2008 jumlah kasus 674 yang diselesaikan 366 sisa 308 kasus

---

<sup>5</sup> Dokumen Banyaknya Kejahatan Yang Diselesaikan Polres Rokan Hilir

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM KEJAHATAN KESUSILAAN

##### A. Gambaran Umum Kejahatan Kesusilaan

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan hal yang cukup sering terjadi baik di kantor, di rumah, di jalanan bahkan di tempat-tempat keramaian. Dalam prakteknya kejahatan atau pelanggaran terhadap kesusilaan ini tidak saja terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak di bawah umur.

Percaya atau tidak, bahwasanya kekerasan pada kaum wanita terjadi setiap siklus kehidupan. Meskipun pembahasan masalah perempuan di tingkat dunia sudah diadakan beberapa kali, kaum wanita masih saja sering menghadapi berbagai ketidak-adilan. Sejarah mencatat, lebih dari 20 juta perempuan dilaporkan telah diperkosa di Bosnia dan Herzegovina pada bulan-bulan pertama perang. Kejahatan kesusilaan semakin rumit dalam persepsi masyarakat dengan menonjolnya era Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Dalam KUHP kejahatan terhadap kesusilaan diatur mulai dari melanggar kesusilaan di hadapan umum, pornografi, zina (*eduitery*), perkosaan (*rape*) bersetubuh dengan wanita tidak berdaya diluar perkawinan dengan wanita belum dewasa, membujuk orang yang belum dewasa untuk bersetubuh, perbuatan cabul dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Roeslan Saleh, *Beberapa Catatan Sekitsr Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, ( Jakarta: Aksara Baru, 2005 ) Hal 35.

<sup>2</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP Dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad 9* ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000 ) Hal 22.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memandang perbuatan terhadap tersebut merupakan suatu pelanggaran kejahatan terhadap kesusilaan, dimana kepada pelaku di berikan ancaman hukuman berupa pidana. Akan tetapi dari beberapa kasus kesusilaan yang ada terutama yang sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib selalu mendapatkan kendala-kendala dalam pembuktiannya hal ini disebabkan :

1. Pada saat peristiwa terjadi, yang ada hanya korban dan pelaku.
2. Tenggang waktu korban melapor cukup lama, bahkan pada kasus perkosaan lainnya korban melaporkan kejadian tersebut setelah hamil.
3. Pelaku sudah melarikan diri atau antara korban dengan pelaku sudah saling kenal.
4. Barang bukti sudah hilang atau sengaja dihilangkan dan lain sebagainya.<sup>3</sup>

Yang tidak kalah pentingnya adalah korban yang tidak mau melaporkan kejahatan perkosaan terhadap dirinya karena menurut anggapannya jika perkosaan tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian, dirinya akan menanggung malu terhadap lingkungan masyarakat atau aib bagi keluarga.

Alasan yang dikemukakan oleh *Steven Box* mengenai peristiwa yang dialami korban ada beberapa tentang tidak adanya pelaporan adalah sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> *Ibid*, Hal 28.

1. Korban mengetahui bahwa dirinya adalah korban kejahatan, tetapi tidak bersedia melapor karena :
  - a. Menganggap polisi tidak efisien atau tidak akan mempedulikan laporannya.
  - b. Menganggap bahwa peristiwa itu merupakan urusan pribadi.
2. Akan menyelesaikan langsung diluar jalur peradilan dengan pelaku.
3. Merasa malu dan tidak bersedia menjadi saksi di kantor polisi (tahap penyidikan) maupun pada saat dilangsungkan pemeriksaan kasus tersebut di sidang pengadilan (misalnya, dalam kejahatan tersebut mengalami penipuan karena kebodohan diri sendiri).
4. Korban tidak mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya menjadi korban dari suatu peristiwa kejahatan.<sup>4</sup>

Dilihat dari uraian di atas perkosaan yang terjadi dilihat dari korban itu sendiri, khususnya di rokan hilir korban didominasi oleh kaum wanita terutama pada anak-anak yang belum dewasa. Keadaan ini secara umum dapat digambarkan bahwa pelaku dengan mudah menguasai korban.

Cara pelaku menguasai korbannya pun cukup lihai, terkadang pelaku hanya mengajak korbanya jalan-jalan ketempat yang tidak asing bagi korban kemudian begitu ada kesempatan pelaku memulai kejahatannya. Sedangkan pada kasus-kasus yang lainnya hanya bermotifkan dendam semata atau hanya

---

<sup>4</sup> Maulana Hasan Wadong, *Kejahatan Warungan Dan Kejahatan Koporasi*, ( Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997 ) Hal 39



mengingginkan sesuatu barang berharga dari korban akan tetapi dengan adanya kesempatan akhirnya pelaku memperkosa korban.

Bila dilihat dampak dari kasus perkosaan ini pada hakekatnya cukup luas, secara psikologi korban menjadi orang yang tertutup dari dunia luar, lebih suka menyendiri, dan yang lebih hebatnya lagi ada yang mengalami trauma yang berkepanjangan. Mereka masih muda masa depannya masih panjang , tetapi hanya dengan suatu peristiwa yang dialaminya semangat hidupnya menjadi redup seketika. Perasaan tidak berguna, kotor, hina, selalu saja menghantuinya.

Tetapi suatu hal yang tidak dapat di pungkiri seperti halnya kata pepatah “tidak akan ada asap kalau tidak ada api”. Demikian pula halnya kejahatan perkosaan, tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada sebabnya, dalam pandangan sempit penyebab tersebut bisa datang dari pelaku, bisa juga dari korban itu sendiri.

Penyebab perkosaan yang datang dari pelaku seperti adanya dendam, sakit hati, akibat tayangan film-film yang memacu birahi, pengaruh minuman yang memabukkan atau pergaulan yang bebas dan lain sebagainya. Sementara penyebab perkosaan yang datangnya dari korban itu sendiri adalah cara berpakaian yang mencolok dan seksi sehingga merangsang lawan jenis yang melihatnya, memakai perhiasan berlebihan, sering sendirian melintasi tempat-tempat sunyi, karena sikap yang kurang baik, serta fisik yang lemah.

Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab keluarga untuk mencegah terjadinya kejahatan perkosaan terlebih-lebih masyarakat dan aparat

penegak hukum. Karena sudah sewajarnya pula setiap kasus yang dilaporkan kepada pihak aparat penegak hukum untuk mendapat perhatian khusus bila perlu memprioritaskan dalam penyelesaiannya.

### **1. Defenisi Perkosaan Secara Umum**

Secara istilah kata “perkosaan” kurang lazim digunakan. Bagi masyarakat awam akan lebih dekat dengan kata menyetubuhi, menggauli, meniduri, mencabuli dan masih banyak lagi istilah-istilah dalam bahasa daerah di berbagai wilayah Indonesia.

Dalam kamus bahasa Indonesia perkosaan adalah menundukkan dengan kekerasan, mengagahi, memaksa dengan kekerasan.<sup>5</sup> Perkosaan adalah tindakan kekerasan seksual yang berupa hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

Defenisi perkosaan ditafsirkan secara terbatas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 285.<sup>6</sup> “bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”.

Perkosaan menurut BRIPTU Yuli Arnizal Jalalulu “perkosaan adalah persetubuhan pada seorang wanita yang bukan istrinya tanpa kemauannya yang dilakukan dengan paksaan atau ancaman”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: Pustaka Amani 2005 ), Hal 307.

<sup>6</sup> R. Soenarto Soedibroto, *Loc.cit*

<sup>7</sup> Wawancara Dengan BRIPTU Yuli Arnizal Jalalulu Tanggal 15 Desember 2008.

Mengapa dikatakan secara paksa? Karena dalam perkosaan baru bisa dikatakan perkosaan, apabila dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur paksaan dan memaksa. Pihak yang dipaksa adalah orang yang menuntut dan merasa sebagai korban yaitu pada umumnya wanita dan yang memaksa biasanya adalah kaum pria sebagai pelaku. Secara historis perkosaan berarti persetubuhan dengan jalan paksa terhadap korbanya yang sampai pada saat-saat terakhir masih tetap menolak untuk melakukan perbuatan tersebut.

Perkosaan dikatakan sebagai kejahatan seksual, karena yang disiksa, dirampas dan dijahati di sini adalah alat kelamin atau seks seorang wanita dan dilakukan dengan cara hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan kondisi sebagai berikut :

- a) Tidak atas kehendak dan persetujuan perempuan
- b) Dengan ‘persetujuan’ perempuan namun dibawah ancaman.
- c) Dengan “persetujuan” perempuan namun dilakukan dengan upaya penipuan.

Bedanya dengan kekerasan seksual sangat tipis yaitu, bila dalam kekerasan seksual belum tentu terjadi persetubuhan atau dimasukkannya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, namun sama-sama dilakukan dengan cara paksaan dan ancaman.

Selain itu, perkosaan juga bias dikatakan perampasan hak-hak asasi wanita. Karena disini hak wanita untuk menolak di setubuhi di langgar secara paksa oleh pelaku. Padahal hak-hak perempuan adalah hak asasi

yang harus dijunjung tinggi dan dihargai oleh setiap insane manusia, bahkan di tingkat nasional pemerintah RI pada tahun 1984 telah meratifikasi konvensi perempuan dengan nama CEDAW (*convention on the elimination of all from of discrimination agains woman*) yang mengenai konvensi anti diskriminasi terhadap perempuan.

Dengan adanya konvensi CEDAW tersebut menjadi bukti bahwa sejak tahun 1979 PBB telah mengakui hak asasi perempuan. Bahkan secara tegas tanggal 20 Desember 1993 PBB telah mengeluarkan deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan.<sup>8</sup>

Melihat rumusannya maka suatu delik dikatakan sebagai delik perkosaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a) **Barang siapa**, unsur ini bisa diartikan secara jelas. Ada yang menganggap sebagai pelakunya, ada juga yang berpendapat manusianya tapi perlu diuraikan berapa jumlahnya.
- b) **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan**, unsur ini merupakan unsur yang paling menonjol, karena jika ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, maka perbuatan itu tidak dapat dianggap sebagai perkosaan, melainkan termasuk tindak pidana lain, misalnya perzinahan (pasal 284 KUHP), mengenai unsur kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak ada penjelasannya dalam KUHP. Apakah kekerasan ini hanya kekerasan fisik saja atau termasuk kekerasan fisik di dalamnya.

---

<sup>8</sup> Webside Kekerasan Terhadap Perempuan : [Http://Www.Google.Com/Budi Wahyuni](http://www.google.com/Budi%20Wahyuni). Terakhir Dikunjungi 5 Agustus 2008, Pukul 13.00WIB.

Dalam KUHP tentang kekerasan ini disebutkan dalam pasal 89 KUHP, yang berbunyi “membuat orang tidak berdaya, disamakan dengan menggunakan kekerasan”.<sup>9</sup> Kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, sehingga orang tidak berdaya atau menggunakan kata-kata yang bersifat menakuti sehingga orang menjadi tertekan dari pengertian tersebut bahwa kekerasan itu tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan non-fisik, hal ini juga ditegaskan oleh Hakim Hj. Melfiharyati SH, kekerasan harus ditandai dengan ditemukannya tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh korban dan dinyatakan dengan surat keterangan dokter *Visum Et Repertum*.<sup>10</sup>

- c) **Dengan memaksa**, memaksa berarti di luar kehendak dari korban atau bertentangan dengan kehendak korban itu sendiri, artinya bahwa dalam menanggapi perbuatan pelaku itu si korban memberikan perlawanan. Padahal ada kemungkinan si korban terlalu lemah untuk memberikan perlawanan. Selain itu perbuatan dikatakan memaksa bila dilakukan tanpa persetujuan si korban sehingga sudah harus dianggap sebagai perkosaan. Padahal persetujuan bisa saja diberikan si korban karena

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hal

<sup>10</sup> Wawancara Dengan Hakim Hj. Melfiharyati, Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir 18 Januari 2009.

adanya unsur penipuan atau ancaman, sehingga tetap bisa dikatakan sebagai perkosaan.

- d) **Bersetubuh dengan dia**, pengertian “bersetubuh” saat ini diartikan bahwa penetrasi alat kelamin laki-laki (penis) kedalam alat kelamin perempuan (vagina). Ini tidak berlaku bagi persetubuhan homoseksual, jadi tidak dapat diterapkan pasal 285 KUHP.
- e) **Di luar perkawinan**, berarti antara korban dan pelaku tidak ada hubungan suami istri. Bila ditinjau secara definitive, perkosaan mempunyai arti yang berbeda, yakni dari sudut pandang medis atau yuridis. Dilihat dari sudut pandang yuridis, perkosaan adalah tindak kejahatan secara kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengannya yang ditandai dengan masuknya alat kelamin laki-laki (penis) yang sudah dalam keadaan ereksi kedalam alat kelamin wanita (vagina), sedangkan ditinjau dari sudut medis, tindakan tersebut baru dapat dikatakan sebagai perkosaan bila dengan ejakulasi atau keluarnya sperma yang kemungkinan menyebabkan kehamilan. Sehingga bias disimpulkan bila tidak sampai mengeluarkan sperma, misalnya yang terjadi baru dua alat kelamin saling bersentuhan tanpa sampai mengakibatkan keluarnya air sperma laki-laki maka perbuatan tersebut belum dapat dikatakan

sebagai perbuatan perkosaan, namun dianggap pencabulan menurut hukum.<sup>11</sup>

## 2. Realitas Dalam Perkosaan

Realitas yang terjadi dalam perkosaan antara lain :

- a. Terjadi secara spontan, biasanya terjadi pelaku suda ada mempunyai niat, dilakukannya tergantung kesempatan
- b. Pelaku adalah orang yang dikenal, pelaku biasanya adalah orang yang dekat atau sudah dikenal terlebih dahulu misalnya, pacar, teman, tetangga atau saudara.
- c. Bukan hanya terjadi di tempat sepi, kebanyakan kasus terjadi di tempat “aman” seperti di rumah, tempat kerja atau sekolah.
- d. Bukan hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi juga menimpa anak-anak, remaja atau orang tua.
- e. Semua perempuan bisa jadi korban, tanpa memperdulikan penampilan, cara berpakaian, agama, ras, suku, pendidikan, pekerjaan, atau tingkat kehidupan social ekonomi.
- f. Bukan hanya dilakukan oleh laki-laki penyandang sakit jiwa, bias juga dilakukan laki-laki normal.
- g. Bukan saja dilakukan oleh laki-laki bersetatus social ekonomi rendah, semua laki-laki bias jadi pelaku perkosaan, tanpa memandang penampila, tingkat sosial ekonomi, pendidikan maupun pekerjaan.

---

<sup>11</sup> S.R. Sianturi, *Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTM*, ( Jakarta, 1983 ), Hal 231.

- h. Bukan hanya masalah perempuan, perkosaan menjadi tanggung jawab bersama baik laki-laki maupun perempuan dan masyarakat Negara.
- i. Merahasiakan peristiwa perkosaan tidak akan menyelesaikan masalah.<sup>12</sup>

### 3. Korban Dan Pelaku Perkosaan

Menurut Triyanto selaku Jaksa Penuntut Umum Rokan Hilir, etika yang umum dikenal oleh dunia baik di barat maupun di timur, bahwa alangkah indahnya bila seorang gadis bisa memberikan keperawanannya bagi laki-laki yang dicintai dan mencintainya. Sehingga wajar apabila seorang gadis mati-matian mempertahankan keperawanannya sebelum ia menikah.<sup>13</sup>

Kaitannya dengan pandangan wanita sebagai viktim, bahwa bila pihak lelaki seenaknya saja memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan intim dengannya padahal si lelaki sudah sepatutnya menduga bahwa diantara mereka belum mempunyai ikatan perkawinan atau apapun, maka si wanita akan sangat menderita karena keperawanannya rusak atau hilang begitu saja oleh orang yang bukan suaminya, sebagaimana *trend* yang kini berlaku di kalangan remaja, dimana perbuatan tersebut hanya kepentingan pemuasan biologisnya saja.

---

<sup>12</sup> Webside perkosaan : <http://www.Yahoomail.Com>. Terakhir Di Kunjungi 14 Maret 2009 Pukul 17.00 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara Dengan Triyanto, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rokan Hilir Tanggal 18 Januari 2009.



Menurut Glaister, tanda-tanda adanya tindak kejahatan perkosaan adalah sebagai berikut :

- a. Hymen robek
- b. Adanya semen (spermatozoon) di dalam vagina
- c. Adanya bercak darah disekitar vagina
- d. Adanya garukan, lecet atau peradangan pada bagian-bagian tubuh.

Tanda-tanda sebagaimana disebut di atas memang merupakan gejala umum yang dsitemukan dalam kasus-kasus perkosaan yang ada. Namun tanda-tanda tersebut tidak selalu ditemukan, karena berbagai hal seperti kemungkinan korban sebelumnya tidak perawan, sehingga *hymen* nya tidak memperlihatkan luka baru ataupun pelakunya menggunakan kondom sehingga tidak ditemukan spermatozoon di vagina korban<sup>14</sup>.

Posisi wanita memang tidak menguntungkan. Wanita tidak bisa dengan mudah melakukan hubungan intim dengan siapa saja dengan semaunya karena wanita mempunyai resiko hamil. Bila kehamilan adalah hasil dari hubungan intim dengan orang yang bertanggung jawab adalah wajar, akan tetapi apabila terjadi hasil dari perbuatan orang yang tidak diinginkan atau tidak dikenal dan tidak bertanggung jawab adalah hal yang sangat menyakitkan bagi kaum wanita.

Akibat yang timbul lebih lanjut adalah para korban cenderung untuk melakukan upaya pengguguran kandungan (aborsi), sehingga muncul di

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dr. Iwan P. Nainggolan di Puskesmas Bangko Jaya Tanggal 12 Januari 2010.

kemudian hari kasus-kasus pembunuhan bayi (*infantisid*). Bila perkosaan terjadi pada kaum wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual sebelumnya, kerugian yang diderita lebih mengarah ke trauma psikisnya saja. Pada intinya tidak ada wanita yang mau hamil di luar pernikahan. Oleh karena itu wanita disebut sebagai korban, karena wanita paling banyak menderita kerugian baik secara fisik maupun psikis.

Perkosaan sebagai kekerasan seksual adalah isu yang hangat sejak kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 lalu.<sup>15</sup> Saat itu tersebar kencang kabar bahwa pada saat kerusuhan yang terjadi ratusan wanita keturunan tionghoa telah menjadi korban perkosaan missal dan penganiayaan yang kejam dan tidak berprilaku manusiawi. Demikian laporan yang diperoleh dari tim relawan untuk kemanusiaan yang dipimpin oleh Romo Sandyawan. Kurang akuratnya bukti-bukti yang ditemukan oleh kepolisian serta kaburnya berita yang sebenarnya mengenai situasi saat kerusuhan tersebut menyebabkan kasus-kasus tersebut dipeti eskan atau dibiarkan mengambang. Situasi ini menurut penulis akan menimbulkan dampak negative bagi masyarakat, yakni perkembangan polemic di kalangan masyarakat mengenai fakta terjadinya perkosaan dan defenisi perkosaan itu sendiri.

---

<sup>15</sup> Webside Komnas Perempuan : <http://www.Or.Id/Benarkah> Terjadi Perkosaan Massal?. Terakhir kali Dikunjungi 14 Maret 2009 Pukul 17.00 WIB.

Pola pikir yang ada pada saat itu masih menganggap kesalahan yang mengakibatkan terjadinya perkosaan itu adalah perempuan itu sendiri.<sup>16</sup>

Ketua Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Joko Sungkowo SH, menyatakan misalnya dikarenakan perempuan yang berpenampilan seksi, dengan pakaian yang sedikit terbuka dibagian bawah atau atas dengan kata lain sedikit mengundang, selain itu karena wanita berada di tempat yang didominasi oleh kaum lelaki, atau bisa juga karena wanita itu berada sendirian di tempat sepi seperti berjalan sendirian di gang-gang yang sepi, gelap dan terkenal rawan.

Bila dipikir dengan logika apakah ada yang salah dengan semua fakta itu? Salahkah seorang perempuan berpenampilan menarik sesuai dengan trend atau mode yang ada saat sekarang ini atau sesuai dengan tuntutan di tempat kerja, di tempat hiburan seperti bar, kafe atau sebagai pramuniaga ditoko atau counter pakaian dan sebagainya. Apakah dengan berpenampilan demikian bisa diartikan bahwa wanita itu minta untuk diperkosa atau boleh saja bila diperkosa? Sedangkan dilain pihak sudah seharusnya setiap warga Negara Indonesia sudah memahami bahwa memperkosa seseorang akan diancam dengan pidana.<sup>17</sup>

Kemudian mungkinkah seorang laki-laki berada di tengah-tengah banyak perempuan dan perempuan itu berpikir untuk memperkosanya

---

<sup>16</sup> Webside Perkosaan : <http://www.Yahoomail.Com/Perkosaan/Kekerasan> Seksual. Terakhir Dikunjungi Tanggal 12 Agustus 2009. Pukul 09.00 WIB.

<sup>17</sup> Wawancara Dengan Hakim Ketua Joko Sungkowo Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Tanggal 18 Januari 2010.

padahal diantara mereka tidak ada hubungan dengan salah satu diantara mereka? Mungkin saja, bila lelaki itu adalah seorang model “*nuded party*” sebagaimana perkembangan seks bebas di kota-kota besar saat ini, jadi sangatlah aneh apabila kita berfikir bahwasanya perkosaan itu terjadi karena pelakunya saja dan tidak ada unsur dari korban itu sendiri.

Pihak yang merupakan pelaku dalam tindak pidana perkosaan lazimnya adalah kaum laki-laki. Sebagaimana uraian di atas jelas bahwa wanita dipandang rendah dan mudah untuk dikuasai serta diserang oleh pelaku perkosaan tersebut, karena disini wanita hanya dijadikan pemuas biologis laki-laki, tidak peduli dimana tempatnya, siapa orangnya, sudah pantas dikawin atau tidak, di bawah umur atau tidak.

#### **4. Penggolongan Perkosaan.**

Penggolongan perkosaan terdiri dari :

- a. *Sadistic rape*, yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Sebelum korban diperkosa terlebih dahulu korban diikat dan dianiaya, dipukuli, atau digigit putingnya hingga putus, wajah, kemaluan, payudara disayat-sayat atau bahkan dibunuh. Dapat juga terjadi setelah diperkosa, alat kelamin korban ditusuk dengan menggunakan alat (besi, kayu, obeng, pisau).seringkali sebagai akibat penganiayaan yang dilakukan terhadap korban, korban menjadi sulit untuk dikenali. Biasanya pelaku *sadistic rape* ini adalah orang yang mengalami gangguan jiwa, pelaku

memperoleh kepuasan dari kekerasan (penganiayaan) yang dilakukannya dan bukan dari persetubuhannya.

- b. *Anger rape*, yaitu perkosaan yang dilatar belakangi oleh rasa marah yang hebat, namun tidak dapat disalurkan dengan baik jadi perkosaan yang dilakukan lebih merupakan upaya balas dendam. Mungkin juga ia pernah di perlakukan tidak baik, dipermalukan atau diperlakukan dengan tidak adil, karena ia ingin melakukan pembalasan dengan seks dipergunakan sebagai alat, sedangkan tujuan utamanya adalah balas dendam.
- c. *Domination rape*, yaitu perkosaan yang dilakukan untuk menunjukkan kekuasaannya. Biasanya dilakukan oleh atasan atau majikan kepada bawahannya dengan ancaman pemecatan atau PHK jika korban tidak mau melayani keinginannya.
- d. *Seduction turned into rape*, yaitu perkosaan yang diawali dengan cumbu rayu. Biasanya antara pelaku dan korban sudah ada hubungan, misalnya sebagai teman kencan atau pacar.
- e. *Exploitation rape*, yaitu perkosaan yang dilakukan sebagai bentuk pemerasan karena korban secara social dan ekonomi tergantung pada pelaku.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Anny Tarigan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, ( Jakarta: Derap Warapsari, 2003 ), Hal 28.

## **B. Pengertian Delik**

Istilah delik, dalam istilah ilmiah/teoritis disebut juga dengan “tindak pidana”, istilah praktis disebut dengan “perbuatan pidana”, menurut Prof. Moeljatno adalah “peristiwa pidana”. Jadi delik adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Dapat pula berarti ”suatu perbuatan yang sesuai dengan rumusan peraturan hukum pidana yang berupa larangan, atau bertentangan dengan rumusan yang berupa suatu keharusan”.

Dalam menentukan delik, asas legalitas menyatakan “tiada suatu perbedaan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan”.

Sebagai pencerminan asas legalitas ketentuan tersebut mengandung makna sebagai berikut :

- Pada prinsipnya dalam menentukan suatu delik harus terlebih dahulu dinyatakan dengan peraturan dalam undang-undang yang berlaku secara umum.
- Peraturan hokum pidana tidak berlaku surut
- Pada prinsipnya untuk menerapkan peraturan pidana tidak dengan menggunakan analogi.

### **1. Bagian Pokok Dalam Delik**

Perumusan delik disetiap perundang-undangan pasti memuat dua bagian pokok yakni norma dan saksi.

Norma merupakan suatu konsep abstrak yang hidup dalam masyarakat dan harus ditaati oleh setiap anggotanya, hanya ditetapkan oleh pembentuk hukum, sehingga sebagian besar norma tersebut terdapat pada undang-undang yang pada dasarnya berupa larangan atau keharusan berbuat. Sanksi merupakan ancaman pidana yang bertugas agar norma yang ditetapkan ditaati.

Rumusan delik berfungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat demi menjamin ketertiban umum, senantiasa berorientasi pada kepentingan umum.

## **2. Pembedaan Jenis Delik Dalam KUHP**

### **a. Delik Kejahatan**

Suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum atau mengganggu kepentingan hukum secara konkrit.

### **b. Delik Pelanggaran**

Perbuatan tidak mentaati peraturan yang berupa larangan atau kehendak pemerintah dan atau mengganggu kepentingan hukum secara abstrak.

### **c. Delik Formal**

Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan peraturan, misalnya pencurian, delik sudah terjadi apabila seseorang mengambil barang milik orang lain dengan melawan hukum dan bermaksud untuk dimiliki. Tanpa memperhatikan berbagai nilai

atau kualitas sebagai akibat negative yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

d. Delik Materil

Tidak ditentukan oleh bentuk perbuatan yang ditetapkan dalam rumusan delik, tetapi akibat dari perbuatan yang dijadikan criteria/pedoman. Misalnya penganiayaan atau pembunuhan, dikatakan menganiaya bila perbuatannya berakibat “rasa sakit” bagi orang lain. Sedangkan pembunuhan terjadi bilamana perbuatan yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Tanpa adanya ketentuan tentang bagaimana cara atau macam perbuatan yang dilakukan.

e. Delik Percobaan

Adanya niat yang diwujudkan dengan suatu perbuatan, namun kegagalan mencapai tujuan yang dimaksud adalah bukan kehendak pelaku, tetapi disebabkan sarana yang tidak memungkinkan, atau diketahui orang lain.

f. Delik Selesai

Perbuatan yang dilakukan sudah mencapai tujuan yang sesuai dengan rumusan delik. Delik yang merumuskan istilah “melawan hukum” dan yang tidak merumuskan (dapat dibaca dengan jelas dalam perumusan perundang-undangan).



g. Delik yang merumuskan istilah “melawan hukum” dan yang tidak dirumuskan (dapat dibaca dengan jelas dalam perumusan undang-undangan)

h. Delik Yang Dikwalifisir

Delik yang membedakan kualitas suatu perbuatan.

### **3. Melawan Hukum**

Walaupun tidak tertulis dalam rumusan delik, pembentuk undang-undang menganggap bahwa unsur melawan hukum selalu ada dalam setiap rumusan delik, karena yang dikategorikan sebagai delik adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun terdapat pengecualian dimana istilah “melawan hukum” tercantum dalam beberapa rumusan delik.

Hal tersebut didasarkan pada konsep pembentuk undang-undang bahwa pada delik-delik tertentu, apabila “melawan hukum” tidak dicantumkan akan dikuatirkan menimbulkan kerugian bagi mereka yang berhak.

Sebagai contoh, yang dimaksud mencuri adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki dengan “melawan hukum”. Berarti yang mengambil barang milik orang lain “untuk dimiliki” tidak selalu dikategorikan sebagai mencuri. Seperti seorang istri berhak terhadap harta suaminya, orang yang terikat hubungan kerja dan dipergunakan sesuai pelaksanaan tugasnya.

Ada dua pendapat mengenai kriteria sifat melawan hukum :

a. Formal

Hukum dipandang sama dengan undang-undang, dengan demikian sifat melawan hukum adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

b. Material

Hukum lebih luas dari undang-undang, jadi meliputi peraturan lain diluar undang-undang. Sifat melawan hukum diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh tata kehidupan masyarakat tidak boleh/pantang untuk dilakukan karena dapat mengganggu ketertiban masyarakat.

Walaupun sistem hukum pidana kita mengandung asas legalitas, di dalam menentukan suatu delik, namun untuk hal yang dikecualikan kita menganut asas materil, mengingat belum pernah terjadi suatu keadaan di Negara kita bahwa hukum sama dengan undang-undang.

Sehubungan dengan hal ini, kita mengakui adanya suatu kemungkinan dimana suatu perbuatan meskipun dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, namun perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana. Hal yang demikian ini disebut “fungsi negatif dari sifat melawan hukum yang materil”. Seperti menunjukkan sarana alat pencegahan kehamilan.

Sebaliknya apabila tidak dicantumkan di dalam rumusan undang-undang sebagai suatu delik, tetapi masyarakat menganggap sebagai suatu perbuatan yang dilarang/dianggap keliru, hal ini disebut “fungsi positif dari sifat melawan hukum materil”, hal yang demikian ini seolah-olah bertentangan dengan asas legalitas. Namun dapat dibenarkan karena dinegara kita asas legalitas tidak bias diterapkan secara mutlak. Mengingat dalam system hukum Indonesia, hukum tidak identik dengan undang-undang.

Misalnya :

- Pelacuran
- Samenleven
- Pengemis/gelandangan.

### **C. Macam – Macam Alat Bukti**

Untuk membuktikan perbuatan pidana dan kesalahan tersebut, dalam hukum acara di pengadilan digunakan alat bukti, menurut pasal 184 KUHP alat bukti yang sah adalah<sup>19</sup> :

- a. Keterangan Saksi, adalah keterangan apa yang saksi nyatakan di persidangan. Saksi adalah seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan perbuatan pidana tersebut.
- b. Keterangan ahli, adalah apa yang seorang ahli nyatakan di dalam persidangan. Biasanya dalam pembuktian kasus perkosaan berupa surat keterangan hasil visum atau yang sering disebut *visum et*

---

<sup>19</sup> R. Soenarto Soedibroto, *KUHP Dan KUHP*, ( Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2006 ), Hal 436.

*repertum, visum et repertum* diperlukan dalam perkara pidana, karena fungsinya yang mampu menjelaskan kondisi tubuh korban pada kasus yang sedang diperiksa. Dikatakan sebagai alat bukti keterangan ahli apabila disampaikan di depan persidangan oleh dokter ahli yang berwenang secara lisan. Bila telah dinyatakan oleh *visum et repertum*, bahwa telah terjadi kekerasan seksual, maka biasanya terdakwa langsung dapat diputus bersalah.

- c. Surat, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri disertai dengan alasan yang jelas.
- d. Petunjuk, adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lainnya. Maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi sesuatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- e. Keterangan terdakwa, yaitu apa yang terdakwa nyatakan di persidangan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

#### **D. Beberapa Kasus Perkosaan Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir.**

##### **1. Kasus Perkosaan Dengan Nomor. 218/Pen.Pid/B/2008/PN-RHL**

###### **Identitas terdakwa**

Nama Lengkap : Hermanto Als Iman Tikung Bin Saminan  
 Tempat Lahir : Bagan Siapiapi  
 Tgl Lahir : 22 juli 1973  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Kebangsaan : Indonesia  
 Alamat : Jln gajah Mada Rt. 11 Rw. 03. Kel. Bagan Barat,  
 Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan : Swasta

###### **Posisi kasus**

Pada hari minggu tanggal 22 juli 2007 sekitar pukul 22.30 WIB, terdakwa bersama dengan sdr. Anto Botuik dan seorang teman dari Sdr. Anto Botuik, mengendarai sepeda motor dengan berboncengan tiga, melewati Gg. Putra Gama dan saat itu terdakwa melihat saksi korban Tatik Wigayanti Als Yanti Binti Karman yang bukan istri terdakwa, berada di depan rumahnya kemudian terdakwa berhenti dan menghampiri saksi korban lalu berkata “darimana dik” dan dijawab oleh saksi korban “dari jalan-jalan” kemudian terdakwa narik tangan saksi korban untuk jalan-jalan. Namun karena saksi korban tidak mau lalu terdakwa menarik tangan saksi korban dan dipaksa untuk naik keatas sepeda motor, selanjutnya dengan berboncengan tiga orang

yaitu terdakwa, saksi korban dan satu teman Sdr. Anto Botuik terdakwa pergi membawa saksi korban menuju warung Sdr. Edi.

Selanjutnya pada pukul 02.00 WIB, setelah lebih kurang 3 jam berada di warung tersebut yang pada saat itu hujan, saksi korban minta diantarkan pulang oleh terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengantar saksi korban pulang dengan berjalan kaki dengan melewati Jln. Sei Garam, dengan alasan jalan tersebut lebih dekat, kemudian dipertengahan jalan saksi korban langsung lari kemudian terdakwa mengejar dan menarik baju saksi korban hingga terjatuh. Kemudian terdakwa dengan kekerasan mengangkat saksi korban ke semak-semak namun saksi korban berusaha untuk meronta, lalu terdakwa menghempaskan saksi korban ketanah. Lalu terdakwa membuka celana saksi korban lalu menindihnya dan berusaha memasukkan alat kelaminnya sambil meremas-remas payudara saksi korban, namun saksi korban terus menerus meronta sehingga terdakwa menjambak rambut dan menampar pipi saksi korban sebanyak satu kali. Selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya dan mengoyang-goyangkan pinggulnya selama 20 menit dan hingga terdakwa mengeluarkan sperma kedalam kemaluan korban. Setelah itu terdakwa mengenakan kembali pakaiannya dan megajak saksi korban pulang kerumah terdakwa, namun ditengah jalan saksi korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bangko.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* Nomor : 25/TU-A\_12/2008 tanggal 17 juli 2008 atas nama Tatik Wigiyanti Binti Karman, yang ditanda

tangani oleh Dr. Muhammad Syukri, selaku dokter pemeriksa, menerangkan sebagai berikut :

Vagina

- Ditemukan luka lecet baru diarah jam 6.8 dan 9 selaput dara tidak ada

Anus

- Tidak ditemukan luka lecet

Akibat perbuatan terdakwa, ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

- Dakwaan primair melanggar pasal 285 KUHP.
- Dakwaan subsidair melanggar pasal 289 KUHP.

Perbuatan terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh *visum et repertum*, yang menyebabkan luka lecet baru diarah jam 6.8 dan 9 selaput dara tidak ada.

Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Hermanto Als Iman Tikung Bin Saminan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- Menjatuhkan pidana penjara 7 tahun
- Menetapkan masa penahanan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**2. Kasus Pemerkosaan Dengan Nomor.330/Pen.Pid/B/2008/PN.RHL.**

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Hariyanto Bin Juman

Tempat Lahir : Kisaran, Sumatra Utara

Tgl Lahir : 10 Juli 1987

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Jln. Lintas Bagan Siapiapi Ujung Tanjung Desa.  
Bantaian Baru Kecamatan. Batu Hampar  
Kabupaten Rokan Hilir

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

## Posisi kasus

Pada hari rabu tanggal 27 Februari 2008 sekitar pukul 22.30 WIB bertempat di Jalan Anas Makmun di kebun sawit Desa Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir. Terdakwa menunggu saksi korban yang di bonceng saksi Catur Wardoyo di Jalan TPI, begitu terdakwa melihat saksi korban melintasi jalan tersebut terdakwa langsung memberhentikan sepeda motor merek Yamaha Jupiter BM 5433 ME yang dikendarai saksi Catur Wardoyo hendak mengantar saksi korban pulang kerumahnya, terdakwa mengatakan kepada saksi Catur Wardoyo “tunggu biar aku yang mengantar pulang” dan dijawab oleh saksi catur wardoyo “ gak usah”, selanjutnya terdakwa memukul muka saksi Catur Wardoyo menggunakan tangan terdakwa sehingga saksi kesakitan dan menangis, kemudian terdakwa meminta kunci motor saksi dengan mengatakan “mana kuncimu” dan saksi memberikan kunci kepada terdakwa selanjutnya terdakwa meminta handphone dengan mengatakan “ mana handphone mu, kau tunggu



disini” dan terdakwa meminta uang kepada saksi Catur Wardoyo sebesar Rp. 10.000,- untuk mengisi minyak sepeda motor.

Setelah handphone dan sepeda motor diserahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor saksi dan menyuruh saksi korban ikut bersamanya dengan alasan akan diantar pulang, namun terdakwa tidak mengantar saksi korban pulang kerumahnya, melainkan membawa saksi korban ke Jl. Annas Makmun dekebun kelapa sawit Desa Bantaian Baru.

Sampainya dikebun kelapa sawit tersebut terdakwa menyuruh saksi korban turun dari sepeda motor, dan selanjutnya terdakwa membuka baju dan selanjutnya terdakwa membuka celana panjangnya hingga telanjang bulat, lalu terdakwa memasang kondom di kemaluannya yang sudah dalam keadaan menegang dan terdakwa menyuruh saksi korban membuka bajunya serta mengancam saksi korban akan melakukan pemukulan apabila saksi korban menolak untuk membuka baju, karena saksi korban merasa takut sehingga saksi korban membuka baju dan celana panjangnya, hingga saksi korban telanjang.

Kemudian terdakwa menyuruh saksi korban tidur di tanah yang sudah dialaskan jaket terdakwa dengan posisi terlentang, kemudian terdakwa memegang kedua pergelangan tangan saksi korban dengan sekuat tenaga hingga saksi korban merasa takut dan tidak bias melarikan diri, lalu terdakwa mengambil posisi di selangkangan saksi korban dan mengarahkan penisnya ke vagina saksi korban sambil menggerakkan pinggulnya kedepan dan kebelakang sehingga saksi korban merasa kesakitan dan berkata “sakit bang” namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut sambil meremas-remas payudara

korban, kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan mengenai kondom yang dipakai terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban memakai baju kembali kemudian terdakwa mengantar saksi korban pulang kerumahnya.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari rumah sakit umum daerah dengan Nomor : 08/TU-S-12/2008 tanggal 01 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Ichsan Effendi dengan hasil pemeriksaan :

#### Vagina

- Dijumpai luka baru ukuran 1 Cm pada selaput darah arah jam 6
- Dijumpai luka memar ukuran 1x1 Cm pada selaput darah arah jam 3
- Selaput tidak utuh

#### Anus

- Tidak ditemukan luka lecet

Akibat perbuatan terdakwa, ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

- Dakwaan primair melanggar Pasal 285, 290 Ayat 2 KUHP.
- Dakwaan subsidair melanggar Pasal 81 Ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002.

Perbuatan terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh *visum et repertum*, yang menyebabkan dijumpai luka baru ukuran 1 Cm pada selaput darah arah jam 6, luka memar ukuran 1x1 Cm pada selaput darah arah jam 3, selaput tidak utuh

Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Hariyanto Bin Juman tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- Menjatuhkan pidana penjara 9 tahun
- Menetapkan masa penahanan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### **3. Kasus Pemerkosaan Dengan Nomor.96/ Pid/B/2008/PN.RHL.**

#### **Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Budi Simanjuntak Bin Morles Simanjuntak

Tempat Lahir : Pematang Bandar

Tgl Lahir : 12 Desember 1983

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Perumahan Pondok II PKS Sungai Bangko  
Desa. Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko  
Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Agama : Kristen Protestan

Pekerjaan : Pelajar

#### **Posisi kasus**

Pada hari minggu Tanggal 24 Februari 2008 sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di perumahan pondok II PKS Sungai Bangko Desa Bangko Sempurna Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, pada awalnya Budi Simanjuntak yang baru pulang mengantar sepeda motornya ketempat

tempel ban karena bocor dan melintasi rumah saksi Geres dan waktu itu saksi korban hanna dan saksi Elvi juga berada di rumah saksi Geres yang sedang bermain.

Kemudian terdakwa datang kerumah saksi Geres dan mengajak salah satu teman saksi Geres yaitu Elvi untuk kerumah terdakwa ternyata saat itu saksi Elvi tidak mau, kemudian terdakwa mengajak serta membujuk saksi korban hanna dengan memberi uang, saksi korban juga saat itu tidak mau, dan mereka pun bertiga kembali bermain, ternyata pada saat itu terdakwa kembali mengajak saksi korban Hanna untuk masuk kedalam rumah terdakwa dan saksi Hanna mengikuti terdakwa masuk kedalam rumah dan langsung menuju kamar.

Sampainya di kamar terdakwa membuka celana dalam saksi korban dan membuka celana dalam terdakwa hingga batas lutut, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur di lantai dan terdakwa langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, begitu masuk alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban, saksi korban langsung menjerit kesakitan dan tidak berapa lama kemudian terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina saksi korban.

Setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memasang kembali celana dalamnya dan memberi uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah), kemudian menyuruh saksi korban untuk pulang lewat cendela kamar karena saat itu saksi Geres dan saksi Malki sedang bermain di halaman rumah terdakwa.

Berdasarkan hasil *visum et repertum* dari Puskesmas Bangko Jaya dengan Nomor : 62/TU-A-12/2008 Tanggal 03 Maret 2008 yang ditanda tangani oleh Dr. Iwan. P. Nainggolan dengan hasil pemeriksaan :

Vagina

- Dijumpai luka robek ukuran 1cm pada selaput darah arah jam 6
- Dijumpai luka memar ukuran 1 cm pada selaput darah arah jam 3
- Selaput tidak utuh

Anus

- Tidak ditemukan luka lecet

Akibat perbuatan terdakwa, ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

- Dakwaan primair melanggar pasal pasal 81 ayat 1 uu no. 23 tahun 2002.

Perbuatan terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh *visum et repertum*, yang menyebabkan dijumpai luka baru ukuran 1 Cm pada selaput darah arah jam 6, luka memar ukuran 1x1 Cm pada selaput darah arah jam 3, selaput tidak utuh

Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Budi Simanjuntak Bin Morles Simanjuntak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan.
- Menjatuhkan pidana penjara 12 tahun

- Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.
- Menetapkan masa penahanan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

#### **4. Kasus Pemerkosaan Dengan Nomor.330/Pen.Pid/B/2008/PN.RHL.**

##### **Identitas Terdakwa**

Nama Lengkap : Ismail Als. Atung Bin Syamsudin

Tempat Lahir : Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Tgl Lahir : 21 Maret 1986

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Alamat : Parit Kabir, Kepenghuluan Sei Majo, Kecamatan  
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

##### **Posisi kasus**

Pada hari Selasa bulan Desember 2008 sekitar Pukul 23.00 WIB, ketika saksi sedang berjalan kaki ke warung di Simpang Pelira berniat membeli obat nyamuk, saksi korban diberhentikan oleh Ismail als. Atung Bin Syamsudin

yang naik motor membonceng menawarkan tumpangan kepada korban, selanjutnya korban berkeliling terlebih dahulu.

Karena waktu sudah larut malam saksi korban meminta Ismail untuk mengantarnya pulang namun ditolak oleh Ismail, setelah itu saksi korban dibawa ke gedung SMP Sei Majo, kemudian mereka turun dan saksi korban ditarik secara paksa oleh Ismail untuk masuk kedalam ruang belajar sekolah namun korban meronta dan menolak sehingga korban terjatuh di teras sekolah, setelah itu korban menindih korban sambil memegang kedua tangan saksi korban, atas perlakuan tersebut korban menjerit “jangan-jangan” tetapi terdakwa tidak mempedulikannya dan terdakwa menutup mulut saksi korban.

Bahwa ketika duduk di tangga tersebut terdakwa menunjukkan kepada saksi korban handphone yang berisikan rekaman adegan porno, saksi korban merebut berniat membuangnya tetapi berhasil direbut kembali oleh terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa mendorong saksi korban hingga terjatuh kelantai dan kemudian terdakwa menindih saksi korban dengan membuka celananya dan celana saksi korban dan selanjutnya memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban sampai dengan selesai.

Akibat perbuatan terdakwa, ia dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal-pasal sebagai berikut :

- Dakwaan primair melanggar pasal 82 UU RI No.32 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.
- Dakwaan subsidair melanggar pasal 285 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP.

- Perbuatan terdakwa tersebut juga dinyatakan oleh *visum et repertum*, yang menyebabkan luka robek pada selaput darah.

Oleh karena itu hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa : Ismail Als Atung Bin Syamsudin tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perkosaan.
- Menjatuhkan pidana penjara 3 Tahun 6 Bulan
- Menetapkan masa penahanan pada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2000,-(dua ribu rupiah).



## **BAB IV**

### **ANALISA KASUS**

#### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Kesusilaan Di Rokan Hilir**

Penelitian terhadap faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan cukup mempunyai arti penting dalam menentukan upaya mengatasi dan penanggulangannya serta pencegahan (preventif). Diketahui dan dipahami faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan tersebut, ikut menentukan metode yang tepat untuk mengatasi kejahatan perkosaan, sehingga usaha dan upaya penanggulangan terhadap kejahatan perkosaan dapat berhasil serta maksimal.

Dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa konsep tentang factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan konsep tersebut belum tentu dapat diterapkan dalam berbagai kasus kejahatan yang ada seperti halnya kasus perkosaan. Karena factor-faktor penyebab kejahatan seerti yang dikemukakan para ahli kriminologi hanya menentukan secara garis besarnya saja, sedangkan realita yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat cukup kompleks sehingga cukup sulit untuk menentukan factor mana yang paling berpengaruh.

Dari uraian di atas, maka penulis menganggap perlu untuk menyajikan faktor-faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya perkosaan di wilayah hukum Rokan Hilir, sebagaimana berikut :

## 1. Faktor Lingkungan Keluarga

Rumah tangga adalah kelompok yang paling kecil diantara kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam masyarakat, rumah tangga merupakan lingkungan yang paling kuat pengaruhnya dalam pembentukan perilaku seseorang. Kepala rumah tangga dapat mendidik anggota keluarganya untuk patuh terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Dalam mendidik, kepala keluarga dapat melakukan berbagai cara guna seluruh anggota keluarganya mampu mentaati semua aturan-aturan yang diberlakukan dalam lingkungan keluarga, dalam mendidik membiasakan dengan peraturan-peraturan itu, kepala keluarga dapat menggunakan cara paksaan tentunya paksaan yang tidak melanggar norma yang ada, sehingga dapat menjamin akan kebutuhan anggota keluarga untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikehendaki oleh kepala keluarga, masyarakat, agama dan Negara.<sup>1</sup>

Baik tidaknya pengaruh hubungan keluarga sangat tergantung pada pengawasan yang baik dan yang penting adalah pendidikan yang diberikan orang tua terhadap anak-anaknya. Sudah tentu tiap-tiap lingkungan rumah tangga orang mengharapkan bahwa para keluarga dapat mendidik anak-anak mereka dengan cara yang sebaik-baiknya.

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan BRIPTU Yuli Arnizal Jalaluhu, di Polres Rokan Hilir

Dari hasil pengamatan penulis tentang kondisi-kondisi rumah tangga menyebabkan terjadinya kejahatan berdasarkan uraian kasus yang ada dalam berkas acara pidana adalah sebagai berikut :

- a. Anggota-anggota dalam suatu keluarga itu adalah pengaruh paling besar pengaruhnya sebagai pemicu terjadinya kejahatan, misalnya salah satu anggota keluarga adalah seorang penjahat, perampok, pemabuk, penjudi dan lain sebagainya, sehingga berpengaruh terhadap pola pikir anggota keluarga lainnya.
- b. Tidak adanya salah satu orang tua yang sangat berpengaruh dalam kegiatan anggota keluarga, misalnya karena meninggal, perceraian atau keluarga yang acuh tak acuh terhadap anggota keluarga lainnya (*brokenhoom*).
- c. Kurangnya perhatian anggota keluarga dikarenakan kesibukan aktivitas sehari-hari, pekerjaan, cacat indranya atau sakit baik fisik maupun psikisnya.
- d. Ketidak serasian antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya karena adanya rasa cemburu, iri hati merasa tidak diperlakukan adil, atau terlalu banyaknya jumlah anggota keluarga sehingga sulit untuk mengontrol satu persatu anggota keluarga.

- e. Perbedaan ras, status sosial, ekonomi, seperti halnya pengangguran penghasilan tidak sebanding dengan pendapatan dan sebagainya.

## **2. Faktor Lingkungan Sosial.**

Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, yang tidak mampu untuk berdiri sendiri dalam menjalankan kehidupannya, manusia adalah makhluk yang membutuhkan kehadiran makhluk lainnya untuk berinteraksi dalam hal apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini.

Masyarakat adalah gabungan dari individu yang hidup bersama dengan individu-individu lain di dalam hubungan kerja sama dan saling berinteraksi berdasarkan norma-norma yang berlaku baginya. Dalam hubungan tersebut sering terjadi konflik atau kesenjangan sosial secara spontan yang menimbulkan pengaruh yang sangat kuat terhadap pribadi seseorang baik berpengaruh positif maupun negatif.

Sesuai dengan kodrat manusia yang memiliki hasrat dan keinginan bertindak sesuai dengan kemauan masyarakat di lingkungan pergaulannya yang tidak ingin disisihkan dalam interaksinya. Padahal tidak selamanya interaksi yang terjadi dalam masyarakat akan membawa efek yang baik bagi individu-individu tersebut.

Misalnya yang terjadi dalam lingkungan salah satu pelaku perkosaan Budi Simanjuntak, dalam lingkungan tempat ia tinggal dan berinteraksi dengan orang lain seringkali dijumpai hal-hal yang melanggar moral seperti perjudian, warung-warung yang menjual minuman keras

(alkohol) dapat berdiri dengan aman tanpa ada sedikitpun warga yang mengusiknya karena mabuk-mabukan merupakan kebiasaan sehari-hari bagi masyarakat sekitar. Serta beredarnya rekaman video porno yang sangat mudah dimiliki hanya dengan membeli di toko-toko setempat tanpa ada batasan bagi konsumen yang membutuhkannya<sup>2</sup>.

Faktor lingkunganlah yang memungkinkan mendorong manusia untuk dapat mengembangkan dirinya dan kemampuannya, terutama dengan adanya kesempatan peniruan terhadap masyarakat, oleh karena itu kejahatan yang timbul dalam masyarakat banyak ditentukan oleh pengaruh lingkungan sosial dan keturunan. Seorang yang mengalami prustasi dalam keluarga, kemungkinan besar ia akan mencari kesenangan-kesenangan di luar lingkungan keluarga. Dalam mencari kesenangan-kesenangan di luar lingkungan, ia mulai membaur diri dengan teman-temannya untuk berinteraksi, disinilah proses terjadinya perilaku-prilaku yang sesungguhnya baik atau tidak baiknya pengaruh lingkungan terhadap pribadinya.

Apabila seorang individu tidak selektif dalam menentukan interaksi sosialnya maka ia lebih cenderung untuk mendapatkan teman yang menanamkan pengaruh buruk terhadap individu tersebut. Individu yang terpengaruh perilaku buruk dari interaksinya dengan dunia luar disebabkan oleh lingkungan keluarga yang kurang baik, selalu ada diskriminasi dalam

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan pelaku perkosaan, Budi Simanjuntak, di Rumah Tahanan Bagan Siapiapi

keluarga, anggota keluarga yang tidak peduli dengan perkembangan anggota keluarga lainnya tentang kegiatannya di lingkungan luar.

Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kejahatan dalam masyarakat, salah satu yang dialami pelaku kejahatan perkosaan yang terjadi di Rokan Hilir. Mereka melakukan kejahatan dikarenakan perilaku lingkungan masyarakat yang kurang baik, dimana lingkungan tersebut sering terjadi aktivitas yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku dimasyarakat, misalnya sering terjadi kekerasan, penganiayaan, pembunuhan perkosaan, judi, mabuk-mabukan pelacuran, perampokan dan lain sebagainya. Meskipun kejahatan tersebut atas inisiatif diri sendiri namun tidak dapat dipungkiri kejahatan tersebut terjadi akibat pengaruh besar lingkungan sekitar dimana individu tersebut berada.

Di berbagai media sering ada berita tentang kasus pemerkosaan. Kita sering heran, mengapa si pria tega-teganya memperkosa dan menyakiti gadis yang tidak berdosa, seakan-akan tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Kemudian kita menimpakan kesalahan paling besar kepada pria pemerkosa tersebut. Memang, pria tersebut salah besar. Tetapi di balik kesalahan besar pria tersebut, ada hal salah lain yang juga bisa menjadi faktor penyebab terjadinya pemerkosaan. Antara lain, pertama, kesalahan dari wanita itu sendiri. Bisa saja wanita itu diperkosa karena senang mengumbar atau mempertontonkan auratnya, sehingga pria tidak tahan melihatnya dan ingin memperkosanya. Karena itu, bagi para wanita,

berpenampilanlah yang sopan dan tutuplah bagian tubuh yang bisa merangsang syahwat pria.

Kesalahan kedua, bisa berasal dari orang tua pria pemerkosa yang kurang memperhatikan perilaku anaknya. Seharusnya orang tua selalu memantau kondisi anak dan meluruskan akhlak anak, jangan sampai anak terlibat kasus pelanggaran hukum. Kesalahan ketiga, bisa berasal dari orang tua perempuan korban pemerkosaan, yang sampai lengah dalam mengawasi anaknya. Seharusnya orang tua selalu siap menjaga keamanan anak agar selamat dari segala macam ancaman, termasuk ancaman dari pria bejat.

Kesalahan keempat, bisa berasal dari lingkungan masyarakat. Di zaman modern yang serba bebas seperti sekarang, akses terhadap pornografi dan pornoaksi semakin mudah. Hal ini mendorong peningkatan kasus pemerkosaan. Kesalahan kelima, bisa berasal dari pemerintah yang kurang tegas memberlakukan hukuman bagi pelanggar hukum, sehingga tidak memberikan efek jera.

### **3. Faktor Adanya Kelainan Seks**

Kelainan seks atau perilaku menyimpang dalam kebutuhan biologis pada manusia bukan merupakan hal yang tabu dalam masyarakat, kelainan pada perilaku seks merupakan salah satu bentuk dari penyakit jiwa (penyakit gila), perilaku-prilaku menyimpang inilah yang sering mengakibatkan terjadinya kejahatan seksual karena sudah pasti perilaku

menyimpang merupakan pelanggaran-pelanggaran norma-norma yang hidup dalam masyarakat maupun agama.

Ketidak mampuan seseorang untuk mengendalikan gejala yang ada dalam kebutuhan seksnya akan berakibat fatal bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang berada dilingkungan ia berinteraksi. Hal ini dapat dijumpai dalam lingkungan terjadinya perkosaan terhadap Tatik Wigiyanti Als Yanti yang dilakukan terdakwa Hermanto Als Iman Tikung, bahwasanya terdakwa tersebut sudah memiliki seorang istri dan telah memiliki dua orang anak, sedangkan korban merupakan salah satu dari Wanita Tuna Susila (WTS) yang ada di lingkungan tersebut. Ketidak mampuan terdakwa dalam mengontrol gejala seks yang ada pada dirinya merupakan bentuk seks menyimpang karena dalam penyalurannya tidak pada semestinya, padahal terdakwa sudah memiliki seorang istri yang kapan saja bisa bekerja sama dalam mengatasi gejala tersebut.

Hal-hal semacam inilah yang sering membawa pengaruh buruk dalam lingkungan masyarakat serta menjadi salah satu faktor penting munculnya kejahatan-kejahatan yang ada.<sup>3</sup>

Ketidak mampuan seseorang mengimbangi perubahan yang ada di lingkungan sekitar akan berimbas pada perilaku kehidupan sehari-harinya dalam masyarakat, pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak mampu untuk dipilah-pilah dalam penerapan kehidupan akan membuat dirinya terbelenggu dengan perbuatan-perbuatan negatif.

---

<sup>3</sup> Wawancara Dengan BRIPTU Yuli Arnizal Jalaluhu, Di Polres Rokan Hilir Tanggal 15 Desember 2008.



Kurang mampu berpikir, membuat penilaian, pemilihan secara tepat dalam menghadapi persoalan tertentu, kurangnya pendidikan dan pembinaan terhadap agama, akibatnya mudah terbawa dan terperosok dalam kesulitan mengontrol kebutuhan seksnya.

#### **4. Faktor Putusan Hakim**

Putusan Hakim yang terasa tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terhadap putusan yang diberikan, hal ini memungkinkan mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat hal keji yang sama. Atinya mereka yang hendak melakukan kejahatan tidak merasa takut lagi dengan sanksi yang akan diterimanya karena sebelumnya kasus yang demikian tidak terlalu berat hukuman yang diakibatkan.<sup>4</sup>

#### **5. Faktor Perkembangan Budaya**

Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika atau norma-norma yang ada dalam masyarakat membawa dampak negatif bagi kelompok masyarakat itu sendiri. Gejala budaya secara umum dapat terlihat pada adanya kecenderungan dari kaum wanita (remaja puteri) mengikuti perubahan budaya kebarat-baratan untuk memakai pakaian ketat, baju transparan, memakai rok mini, menggunakan busana belahan dada terbuka, memakai perhiasan yang mencolok, semuanya itu merupakan pemandangan yang cukup sering kita jumpai baik di pasar – pasar tradisional, swalayan maupun tempat-tempat umum lainnya. Seni tari misalnya meskipun memuat tarian-tarian erotik tampaknya semakin

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum, Triyanto, Tanggal 18 Januari 2010.

diterima oleh masyarakat sebagai tontonan atau hiburan, hal semacam ini dapat pula dijumpai dimana terjadinya peristiwa perkosaan.

## **6. Faktor Kenakalan Remaja.**

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi pengetahuan yang diserap.

Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya.

Perilaku 'nakal' remaja bisa disebabkan oleh faktor dari remaja itu sendiri (internal) maupun faktor dari luar (eksternal).<sup>5</sup>

Faktor internal:

### **a. Krisis identitas**

Perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua.

### **b. Kontrol diri yang lemah**

Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan

---

<sup>5</sup> *Ibid*

terseret pada perilaku 'nakal'. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya.

Faktor eksternal:

a. Keluarga

Perceraian orangtua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga pun, seperti terlalu memanjakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak, bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja.

b. Teman sebaya yang kurang baik

c. Komunitas/lingkungan tempat tinggal yang kurang baik.

## **B. Upaya Penegakan Hukum Kejahatan Perkosaan Oleh Pengadilan Negeri**

### **Rokan Hilir**

#### **1. Berpangkal Pada Sistem**

Pertama, Sumber hukum adalah undang-undang yang berlaku di Indonesia, serta tata cara penegakan hukumnya juga telah diatur dalam undang-undang hukum acara pidana, oleh karena itu hakim harus memutuskan suatu perkara berdasarkan aturan-aturan tersebut. Hakim dalam menentukan seseorang bersalah atau tidak mesti melihat fakta yang ada berdasarkan penyidikan yang dilakukan kepolisian, kehakiman serta penjelasan atau keterangan ahli (*visum et revertum*).

Kedua, adanya pengadilan yang bertingkat-tingkat. Keputusan pengadilan di bawahnya bisa dianulir oleh pengadilan di atasnya. Oleh karenanya, seseorang yang telah diputus bersalah dan harus menjalani hukuman sekian bulan atau tahun, kemudian mengajukan banding pengadilan ke tingkat atasnya yang lebih mengikat. Keputusan itu bisa memperberat hukuman, memperingan, atau bahkan membebaskan sama sekali. Itu berarti, untuk mendapatkan keputusan hukum tetap, harus menempuh beberapa jenjang pengadilan.<sup>6</sup>

#### **2. Menegakkan Integritas Hakim**

Kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh pejabat peradilan seolah tiada henti terjadi. Satu per satu kasus terkuak di hadapan publik.

---

<sup>6</sup> Wawancara Dengan Hakim Ketua, Joko Sungkowo, Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 18 Januari 2010.

Mulai dari jaksa yang teledor dalam menyusun dakwaan, hingga hakim yang seenaknya memutus perkara.

Itu adalah kasus di dalam ruang sidang, belum lagi yang di luar ruang sidang. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat peradilan seperti oleh hakim masih juga sering terjadi, termasuk juga pengambilan putusan yang tidak profesional. Beruntung, negeri ini memiliki Komisi Yudisial (KY) yang bekerja mengawasi perilaku hakim.

Penyalahgunaan wewenang di lembaga peradilan merupakan musuh masyarakat. Sebab, selain merusak sendi peradilan juga dapat menurunkan kewibawaan serta kepercayaan masyarakat serta dunia internasional terhadap lembaga peradilan di Indonesia. Oleh karena itu seorang hakim harus mengerti dengan benar wewenang dan kewajiban apa yang harus dilakukan, hakim harus sungguh-sungguh dalam memutuskan perkara yang ada dengan penuh keyakinan dan pengetahuannya.

### **3. Menentukan Jenis Delik**

Suatu laporan tentang seorang yang disetubuhi atau dilecehkan secara seksual oleh seseorang lainnya tidak selalu berarti kasusnya adalah perkosaan. Untuk kasus-kasus semacam ini kita harus memilah termasuk kategori delik yang manakah kasus tersebut, yang masing masing mempunyai kriteria dan hukuman yang berbeda satu sama lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan hakim Hj. Melfiharyati, di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 20 Januari 2010.

### **a. Perkosaan**

Menurut KUHP pasal 285 perkosaan adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menyetubuhi seorang wanita di luar perkawinan. Termasuk dalam kategori kekerasan disini adalah dengan sengaja membuat orang pingsan atau tidak berdaya (pasal 89 KUHP). Hukuman maksimal untuk delik perkosaan ini adalah 12 tahun penjara.

### **b. Persetubuhan diluar perkawinan**

Persetubuhan diluar perkawinan antara pria dan wanita yang berusia diatas 15 tahun tidak dapat dihukum kecuali jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap wanita yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Untuk perbuatan yang terakhir ini pelakunya dapat dihukum maksimal 9 tahun penjara (pasal 286 KUHP) jika persetubuhan dilakukan terhadap wanita yang diketahui atau sepatutnya dapat diduga berusia dibawah 15 tahun atau belum pantas dikawin maka pelakunya dapat diancam hukuman penjara maksimal 9 tahun.

Untuk penuntutan ini harus ada pengaduan dari korban atau keluarganya (pasal 287 KUHP) . Khusus untuk yang usianya dibawah 12 tahun maka untuk penuntutan tidak diperlukan adanya pengaduan.

### **c. Perzinahan**

Perzinahan adalah persetubuhan antara pria dan wanita diluar perkawinan, dimana salah satu diantaranya telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Khusus untuk delik ini penuntutan dilakukan oleh pasangan dari yang telah kawin tadi yang diajukan dalam 3 bulan disertai gugatan cerai/pisah kamar/pisah ranjang. Perzinahan ini diancam dengan hukuman penjara selama maksimal 9 bulan.

#### **d. Perbuatan cabul**

Seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, maka ia diancam dengan hukuman penjara maksimal 9 tahun (pasal 289 KUHP).<sup>8</sup>

Hukuman perbuatan cabul lebih ringan, yaitu 7 tahun saja jika perbuatan cabul ini dilakukan terhadap orang yang sedang pingsan, tidak berdaya. berumur dibawah 15 tahun atau belum pantas dikawin dengan atau tanpa bujukan (pasal 290 KUHP).

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap orang yang belum dewasa oleh sesama jenis diancam hukuman penjara maksimal 5 tahun (pasal 291 KUHP).

Perbuatan cabul yang dilakukan dengan cara pemberian, menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa atau penyesatan terhadap orang yang belum dewasa diancam dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun (pasal 293 KUHP) .

Perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak, anak tiri, anak angkat, anak yang belum dewasa yang pengawasan, pemeliharaan,

---

<sup>8</sup> R. Soenarto Soedibroto, *Op. Cit.* Hal 174.

pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, dengan bujang atau bawahan yang belum dewasa diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun.

#### **4. Pemeriksaan Korban**

Jika korban dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis, maka dokter punya kewajiban untuk melaporkan kasus tersebut ke polisi atau menyuruh keluarga korban untuk melapor ke polisi.

Korban yang melapor terlebih dahulu ke polisi pada akhirnya juga akan dibawa ke dokter untuk mendapatkan pertolongan medis sekaligus pemeriksaan forensik untuk dibuatkan *visum et repertum*-nya.

Secara umum dokter bertugas mengumpulkan bukti adanya kekerasan, keracunan, tanda persetubuhan, penentuan usia korban dan pelacakan benda bukti yang berasal dari pelaku. Pencarian benda-benda bukti yang berasal dari pelaku pada tubuh atau pakaian korban dan tempat kejadian perkara merupakan hal penting yang paling sering dilupakan oleh dokter.

Pada kasus perkosaan dan delik susila lainnya perlu dikumpulkan informasi-informasi sebagai berikut :

##### **a. Umur Korban**

Umur korban sangatlah perlu ditentukan pada pemeriksaan medis, karena hal itu menentukan jenis delik (delik aduan atau bukan),



jenis pasal yang dilanggar dan jumlah hukuman yang dapat dijatuhkan.<sup>9</sup>

Dalam hal korban mengetahui secara pasti tanggal lahirnya/umurnya, apalagi jika dikuatkan oleh bukti diri (KTP, SIM dsb) , maka umur dapat langsung disimpulkan dari hal tersebut.

Akan tetapi jika korban tak mengetahui umurnya secara pasti maka perlu diperiksa erupsi gigi molar II dan molar III. Gigi molar II mengalami erupsi pada usia kurang lebih 12 tahun, sedang gigi molar III pada usia 17 sampai 21 tahun. Untuk wanita yang telah tumbuh molar II nya, perlu dilakukan foto ronsen gigi. Jika setengah sampai seluruh mahkota molar III sudah mengalami mineralisasi (terbentuk) , tapi akarnya belum maka usianya kurang dari 15 tahun.<sup>10</sup>

#### **b. Tanda Kekerasan**

Yang dimaksud dengan kekerasan pada delik susila adalah kekerasan yang menunjukkan adanya unsur pemaksaan, seperti jejas bekapan pada hidung, mulut dan bibir, jejas cekik pada leher, kekerasan pada kepala, luka lecet pada punggung atau bokong akibat penekanan, memar pada lengan atas dan paha akibat pembukaan secara paksa, luka lecet pada pergelangan tangan akibat pencekalan dsb.

Adanya luka-luka ini harus dibedakan dengan luka-luka akibat "foreplay" pada persetubuhan yang "biasa" seperti luka isap (cupang)

---

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Tim Penyidik, BRIPTU Yuli Arnizal Jalaluhu, Di Polres Rokan Hilir, 15 Desember 2009.

<sup>10</sup> Webside Perkosaan, <http://www.yahoo.com/Perkosaan/Kekerasan> Seksual Pada Anak Di Indonesia. Terakhir Dikunjungi 25 Februari 2010. Pukul 22.00 WIB.

pada leher, daerah payudara atau sekitar kemaluan, cakaran pada punggung (yang sering -terjadi saat orgasme) dsb.

Luka-luka yang terakhir ini memang merupakan kekerasan tetapi bukan kekerasan yang dimaksud pada delik perkosaan. Adanya luka-luka jenis ini harus dinyatakan secara jelas dalam kesimpulan visum et repertum untuk menghindari kesalahan interpretasi oleh aparat penegak hukum.

Tanpa adanya kejelasan ini suatu kasus persetubuhan biasa bisa disalahtafsirkan sebagai perkosaan yang berakibat hukumannya menjadi lebih berat.

Pemeriksaan toksikologi untuk beberapa jenis obat-obatan yang umum digunakan untuk membuat orang mabuk atau pingsan perlu pula dilakukan, karena tindakan membuat orang mabuk atau pingsan secara sengaja dikategorikan juga sebagai kekerasan. Obat-obatan yang perlu diperiksa adalah obat penenang, alkohol, obat tidur, obat perangsang (termasuk ecstasy) dsb.<sup>11</sup>

### **c. Tanda Persetubuhan**

Tanda persetubuhan secara garis besar dapat dibagi dalam tanda penetrasi dan tanda ejakulasi. Tanda penetrasi biasanya hanya jelas ditemukan pada korban yang masih kecil atau belum pernah melahirkan atau nullipara.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Pada korban-korban ini penetrasi dapat menyebabkan terjadinya robekan selaput dara sampai ke dasar pada lokasi pukul 5 sampai 7, luka lecet, memar sampai luka robek baik di daerah liang vagina, bibir kemaluan maupun daerah perineum. Adanya penyakit keputihan akibat jamur *Candida* misalnya dapat menunjukkan adanya erosi yang dapat disalah artikan sebagai luka lecet oleh pemeriksa yang kurang berpengalaman. Tidak ditemukannya luka-luka tersebut pada korban yang bukan nulipara tidak menyingkirkan kemungkinan adanya penetrasi.

Tanda ejakulasi bukanlah tanda yang harus ditemukan pada persetubuhan, meskipun adanya ejakulasi memudahkan kita secara pasti menyatakan bahwa telah terjadi persetubuhan. Ejakulasi dibuktikan dengan pemeriksaan ada tidaknya sperma dan komponen cairan mani. Untuk uji penyaring cairan mani dilakukan pemeriksaan fosfatase asam. Jika uji ini negatif, kemungkinan adanya ejakulasi dapat disingkirkan. Sebaliknya jika uji ini positif, maka perlu dilakukan uji pemastian ada tidak sel sperma dan cairan mani.<sup>12</sup>

## **5. Pembuktian Terhadap Kasus**

Dalam sistim peradilan yang dianut negara kita, seorang hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang terdakwa kecuali dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia merasa yakin bahwa tindak pidana itu memang telah terjadi (Pasal 183 KUHAP) .

---

<sup>12</sup> Wawancara Dengan Dr. Iwan P. Nainggolan Di Puskesmas Bangko Jaya Tanggal 11 Desember 2009.

Sedang yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pasal 184 KUHP).<sup>13</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pada suatu kasus perkosaan dan delik susila lainnya perlu diperjelas keterkaitan antara bukti-bukti yang ditemukan :

1. Tempat kejadian perkara,
2. Tubuh atau pakaian korban,
3. Tubuh atau pakaian pelaku dan
4. Pada alat yang digunakan pada kejahatan ini ( penis ).<sup>14</sup>

Keterkaitan antara 4 faktor inilah yang seringkali dijabarkan dalam prisma (segiempat) bukti dan merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan keyakinan hakim.

Pada banyak kasus perkosaan keterkaitan empat faktor ini tidak jelas atau tidak dapat ditemukan sehingga mengakibatkan tidak timbul keyakinan pada hakim yang bermanifestasi dalam bentuk hukuman yang ringan dan seadanya.

Beberapa hal yang dapat mengakibatkan terjadinya hal ini adalah hal-hal sbb:

1. Masalah teknis pengumpulan benda bukti.
2. Masalah keutuhan barang bukti
3. Masalah teknis pemeriksaan forensik dan laboratorium

---

<sup>13</sup> R. Soenarto Soedibroto, *Op.cit*, Hal 435-436.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Hakim, Sangkot I. Tobing Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Tanggal 14 Januari 2010.

4. Masalah pengetahuan dokter pemeriksa
5. Masalah pengetahuan aparat penegak hukum

## **6. Pemeriksaan Forensik Dan Laboratorium**

Kemampuan pemeriksaan pusat pelayanan perkosaan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya. Suatu klinik yang tidak melakukan pemeriksaan sperma sama sekali tentu tak dapat membedakan antara robekan selaput dara atau robekan akibat benda tumpul pada masturbasi. Klinik yang hanya melakukan pemeriksaan sperma langsung saja tentu tak dapat membedakan tidak adanya persetubuhan dengan persetubuhan dengan ejakulasi dari orang yang tak memiliki sel sperma (pasca vasektomi atau mandul tanpa sel sperma).

Suatu klinik yang hanya melakukan pemeriksaan sperma dengan uji fosfatase asam saja misalnya tentu hanya dapat menghasilkan kesimpulan terbatas: ini pasti bukan sperma atau ini mungkin sperma

Pemeriksaan pada kasus perkosaan untuk pencarian pelaku dilakukan dengan melakukan pemeriksaan pada bahan rambut atau bercak cairan mani, bercak/cairan darah atau kerokan kuku. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya adalah pemeriksaan pola permukaan luar (kutikula) rambut, pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan sidik DNA.

Pemeriksaan sidik DNA yang dilakukan pada bahan yang berasal dari usapan vagina korban bukan saja dapat mengungkapkan pelaku

perkosaan secara pasti, tetapi juga dapat mendeteksi jumlah pelaku pada kasus perkosaan dengan banyak pelaku (*salome*).

## **7. Putusan Yang Tegas**

Seorang Hakim tidak boleh bersifat objektif dan subjektif, Hakim harus arif dan bijaksana dalam memutuskan perkara kepada terdakwa, Hakim harus melihat apakah putusan itu adil untuk kedua belah pihak baik itu untuk korban maupun untuk terdakwa itu sendiri, Hakim juga tidak boleh menggunakan keyakinan terlebih dahulu dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, melainkan keyakinan Hakim baru timbul setelah memeriksa semua alat bukti yang diperoleh. Hakim juga harus berhati-hati dalam menggunakan alat bukti yang ada serta berhati-hati dalam menganalisa keterangan saksi-saksi persidangan.

Alat bukti dalam Pasal 184 KUHAP yang sangat penting adalah keterangan saksi, karena keterangan saksi adalah keterangan dari seseorang mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat dan yang ia alami sendiri. Sebagai alat bukti yang sah, keterangan saksi harus diucapkan di dalam persidangan dan di bawah sumpah atau janji.

Hakim tidak boleh mempidana seseorang kecuali dengan adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah maka hakim yakin akan kesalahan terdakwa. Prinsip yang terkandung di dalam pasal 183 KUHAP ini bukan saja mengenai system pembuktian secara negative tetapi juga adanya suatu prinsip yang harus ditaati dalam pembuktian ini yaitu mengenai harus adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dalam pembuktian setiap

tindak pidana, atau lebih dikenal dengan istilah asas minimum pembuktian.<sup>15</sup>

Demikian pula halnya dalam penetapan hukum di Pengadilan. Meski banyak pendapat yang berkenaan dengan suatu perkara namun Hakim yang telah diberi kewenangan oleh negara untuk menetapkan perkara harus menetapkan keputusan berdasarkan apa yang dianggapnya paling kuat. Ini karena hukum yang ia putuskan adalah berdasarkan undang-undang.

Oleh karena itu seorang Hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara pidana dalam persidangan harus berdasarkan ketentuan undang-undang sesuai dengan delik yang dilakukan oleh tersangka, putusan seorang Hakim tidak boleh terpengaruh dari hal-hal yang ada diluar pengadilan, misalnya karena adanya hubungan kerabat, teman, dan sebagainya.

Putusan Hakim terhadap kasus yang ditanganinya bukanlah bentuk perwujudan balas dendam melainkan menjunjung tinggi asas keadilan, setelah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersangka.

---

<sup>15</sup> Wawancara Dengan Hakim Ketua, Joko Sungkowo, Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tanggal 18 Januari 2010.

### C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Kasus Perkosaan

Menurut bahasa jarimah/jinayat berarti segala sesuatu yang harus di jauhi oleh setiap orang dari segala bentuk kejahatan dan usaha yang mengarah pada kejahatan. Adapun menurut istilah fiqh, jinayat berarti suatu nama bagi setiap perbuatan yang diharamkan syara' baik yang menyangkut terhadap jiwa, harta benda dan lain-lainnya.<sup>16</sup>

Dalam hukum pidana Islam istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu tindak pidana kejahatan adalah "jarimah".

Jarimah berasal dari kata yang secara harfiah artinya memotong atau berusaha. Abu Zahrah mengartikan jarimah sebagai :

"Suatu perbuatan yang patut dikenai hukuman"

Lebih jauh menurut Abu Zahrah, jarimah digunakan juga untuk menyebut suatu perbuatan yang dibenci, tidak baik dan mengandung unsur dosa, sedangkan Imam Al-Mawardi mendefenisikan sebagai berikut :

"Larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir".

Yang dimaksud dengan "mahzhurat" adalah melakukan perbuatan yang diperintahkan. Mahzhurat disini mempunyai syar'iiyyat. Sifat ini menunjukkan bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak

---

<sup>16</sup> M. Nashir Cholis, *Loc.cit.*



melakukan perbuatan yang diperintahkan melakukannya itu diancam dengan hukuman syari'at.

Banyak fuqoha yang menggambarkan jarimah dengan lapadz "jinayah". Secara etimologis jinayah berarti nama bagi suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>17</sup> Sedangkan menurut terminologi hukum islam, jinayah adalah nama perbuatan yang diharamkan (dilarang) oleh syari'at, baik yang menyangkut terhadap jiwa, harta benda atau keturunan<sup>18</sup>. Akan tetapi kebanyakan fuqaha memakai kata-kata jinayah hanya untuk perbuatan yang menyangkut jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul, menggugurkan kandungan dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut Mustafa Ahmad Zarqa, seperti yang dikutip oleh Dede Rosyada dalam bukunya hukum Islam dan pranata sosial menyebutkan bahwa jinayah "tindak kriminal" adalah tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup>

Dari uraian diatas bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar undang-undang termasuk juga tindak pidana perkosaan. Untuk lebih jelasnya penulis uraikan tentang tindak pidana perkosaan.

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Jarimah, Ensiklopedi Islam*, ( Jakarta: Ditjen Binbaga Islam, 1994 ) Hal 449.

<sup>18</sup> Muhammad Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqh*, ( Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994 ) Cet. Ke-1, Hal 3.

<sup>19</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1996 ) Cet. Ke-3, Hal 1.

<sup>20</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, ( Jakarta: Rajawali Press, 1993 ) Cet.1, Hal 86.

Perkosaan berasal dari istilah *Verkrachting* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dimana terjemahan itu sebenarnya kurang tepat, oleh karena dalam bahasa Indonesia kata perkosaan saja sama sekali belum menunjukkan pada pengertian perkosaan untuk bersetubuh, sedangkan istilah *Verkrachting* ini sudah dibakukan yang berarti perkosaan untuk bersetubuh<sup>21</sup>. Dimana yang melakukan perkosaan diancam dengan pasal 285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya dihukum karena perkosaan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”.<sup>22</sup>

Menurut hukum Islam perkosaan disebut dengan zina dengan pemaksaan yang dalam istilah fiqh disebut “Al-Wath’u Bi Al-Ikrah”. Kata-kata ikrah (paksaan) banyak dijumpai dalam Al-Quran diantaranya dapat dilihat dalam surat An-Nisa’ Ayat 19 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, ( Bandung: Erasco, 1980 ) Hal 123.

<sup>22</sup> R. Soenarto Soedibroto, *Loc.cit.*

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, ( Jakarta: Bumi Restu, 1974 ) Hal

Adapun pengertian paksaan dengan syara' adalah :

Artinya : “ Rangkaian dari ajakan untuk melakukan suatu perbuatan dengan ancaman”.<sup>24</sup>

Bila dihubungkan dengan pengertian pemaksaan dalam melakukan zina (Al-Wath'u Bi Al-Ikhrah) berarti suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk melakukan perbuatan zina tanpa persetujuan si korban dengan adanya ancaman dari si pelaku sehingga si korban tidak dapat membela dirinya.

Untuk dapat dikatakan suatu pemaksaan itu harus ada beberapa kriteria sebagai berikut :

1. Adanya kekuatan orang yang memaksa, baik ia mempunyai kekuatan yang dapat dipergunakannya sehingga orang yang dipaksa tidak dapat lagi menghindarinya.
2. Keadaan orang yang dipaksa pada dasarnya tidak mau melakukannya.
3. Orang yang dipaksa melakukan paksaan hanya karena ingin menyelamatkan diri.

Sedangkan menurut Ahmad Hanafi, mengatakan bahwa syarat-syarat untuk terwujudnya paksaan itu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Ibn Mas'ud Al-Kasani, *Bada'i Alsana'i, Juz VII*, ( Bairut: Dar Al-Kutub Al-Almiyyah, 1992 ) Hal 175.

1. Orang yang memaksa mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ancaman, meskipun ia bukan golongan penguasa atau pejabat tertentu, sebab yang menjadi ukuran adalah kesanggupan nyata.
2. Orang yang dipaksa yakin bahwa apa yang diancamkan benar-benar akan terjadi, bila tidak memenuhi apa yang dipaksakan. Bila dapat menghindari paksaan tersebut, maka dalam hal ini dapat dinyatakan sebagai keadaan terpaksa.
3. Perkara yang diancamkan adalah perbuatan yang dilarang seperti melakukan pembunuhan, zina dan lain sebagainya.<sup>25</sup>

Pemaksaan kehendak oleh suatu pihak individu terhadap suatu pihak atau individu, sehingga suatu pihak atau individu menjadi korban, dapat diterjemahkan dengan 2 (dua) ungkapan yaitu :

1. Sebagai perampasan hak dan mengoyak kehormatan orang lain.
2. Sebagai perilaku yang dapat melahirkan kekacauan fisik individual dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Berdasarkan dua persoalan yang melekat pada perilaku tersebut diatas maka menurut konsep hukum islam terdapat *illat* yang sejajar dengan hirabah. Sayyid sabiq dalam pendapatnya menyebutkan unsur yang ada dalam hirabah antara lain adalah perilaku yang melahirkan kekacauan, ketertiban, pertumpahan darah, perampasan harta, dan mengoyak kehormatan.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Ahmad Hanafi, *Op.cit.* Hal 357.

<sup>26</sup> Sayit Sabiq, *Fikih Sunnah, Terjemahan Moh. Nabban Husein*, ( Bandung: Al-Ma'rifat, 1996 ), Jilid 9 Hal 175.

Berdasarkan kesamaan *illat* tersebut di atas maka tidak ada keraguan untuk mengkalifikasikan perkosaan (Zina Bil Ikrah) sebagai perilaku hirabah.

Dalam Al-Qur'an memuatkan hukuman bagi orang yang melakukan hirabah sebagai orang yang menyerang Allah SWT, dan Rasulnya. Allah menghukum berat kepada pelakunya, yang mana hukuman bagi pelaku hirabah tidak diberikan tindak kejahatan lainnya. Diantara hukuman yang ditetapkan Allah terhadap orang yang melakukan hirabah adalah sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Maidah Ayat 33

وَأَوْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا

بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنَقَّوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي تُقَطَّعُ أ

الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya : Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi

Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi,

hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan

kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri

(tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu

penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>27</sup>

Berdasarkan ayat di atas hukuman terhadap tindak kejahatan hirabah adalah sebagai berikut :

1. Dibunuh
2. Disalib
3. Dipotong tangan dan kakinya secara silang
4. Dibuang dari negeri tempat kediamannya.

Sedangkan bagi korban perkosaan tidak dianggap berdosa, oleh karena itu tidak diberikan sangsi hukuman karena ia tidak berdaya dan tidak dengan sengaja melakukannya.

Artinya “ Allah memaafkan ummatku yang melakukan sesuatu karena keliru (tidak sengaja), lupa dan terpaksa”. HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, ( Jakarta, Bumi Restu, 1974 )  
Hal

Tujuan hukuman dalam Islam adalah untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah serta menjauhi larangannya dengan tujuan memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta benda. Agar tercapainya maksud dari hukuman itu, maka ia harus mempunyai beberapa syarat antara lain :

1. Hukuman tersebut hendaklah mempunyai pengaruh yang besar terhadap orang lain.
2. Harus seimbang antara hukuman yang dijatuhkan dengan kejahatan yang dilakukan.
3. Hukuman itu harus bersifat umum, dalam arti bahwa berlaku bagi setiap orang yang berbuat jarimah, tanpa memandang pangkat, keturunan dan pertimbangan-pertimbangan lainnya.
4. Hukuman tersebut hendaknya mempunyai pengaruh yang cukup berat.

Jadi maksud dari hukuman perkosaan yang diberikan kepada pelaku perkosaan adalah untuk menjaga keamanan dan keadilan hukum bagi yang melakukan kejahatan perkosaan dan bagi orang yang menjadi korban perkosaan

---

<sup>28</sup> H.E. Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ) Hal 44.

serta membuat seluruh masyarakat enggan (tidak mau) untuk melakukan perbuatan tersebut.

#### **D. Analisa Penulis**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab III bahwa Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menyelesaikan dan memutuskan perkara perkosaan dengan Nomor perkara :

- 1.Nomor. 218/Pen.Pid/B/2008/PN-RHL,
- 2.Nomor. 330/Pen.Pid/B/2008/PN.RHL.
- 3.Nomor. 96/Pen.Pid/B/2008/PN.RHL.
- 4.Nomor. 330/Pen.Pid/B/2008/PN.RHL.

Dengan menjatuhkan pidana selama 3 Tahun sampai dengan 12 Tahun, padahal dalam kasus yang sama hanya saja berbeda tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum, tidak mencerminkan rasa keadilan.

Berdasarkan Pasal 183 KUHP dan Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat terlihat bahwa, untuk menentukan kesalahan terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus :

1. Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah” menurut undang-undang.
2. Dan atas keterbukaan dengan setidaknya-tidaknya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak



pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang benar-benar melakukannya.

Dengan demikian dapat di lihat bahwa ada dua unsur dari rumusan pasal-pasal tersebut, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Dalam kedua Unsur tersebut tidak ada yang paling dominan, hal ini dapat dilakukan melalui pembuktian baik itu dimulai dari pihak penyidik yang merumuskan berkas acara pemeriksaan.

Tim penyidik yang menerima laporan harus memberikan suatu jaminan bahwa korban dalam keadaan yang aman. Hal ini dimaksudkan agar pada saat mencari keterangan, korban dengan leluasa menceritakan peristiwa perkosaan tersebut yang akan mempermudah penyidik dalam mengumpulkan alat-alat bukti yang lain.

Keterangan dari saksi-saksi yang melihat kejadian peristiwa perkosaan akan sangat membantu tim penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku, penyidik harus berhati hati dalam mencari keterangan dari korban dan keterangan dari saksi-saksi lainnya.

Selain dari tim penyidik diperlukan juga kerja sama dari pihak kejaksaan. Dimana jaksa penuntut umum dalam merumuskan suatu surat dakwaan yang akan diproses di persidangan hari dilakukan penuh dengan kehati-hatian. Jaksa penuntut umum juga akan melakukan pembuktian apakah benar yang dinyatakan dalam berita acara pemeriksaan dengan rumusan surat dakwaan dan merumuskan pasal-pasal yang akan didakwakan kepada pelaku.

Apabila surat dakwaan tunggal, maka hakim hanya mencari kebenaran alat bukti tersebut sebatas unsur-unsur yang didakwakan dalam surat dakwaan. Namun apabila dalam dakwaan memuat dua unsur pasal yaitu dakwaan primer dan dakwaan subsidier, maka hakim harus membuktikan dakwaan primer terlebih dahulu karena dakwaan primer merupakan dakwaan yang paling memberatkan terdakwa.

Juasa penuntut umum juga harus benar-benar merumuskan pasal yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa, sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan,

Disini hakim memiliki peran besar dalam menjatuhkan ponis kepada terdakwa, hakim dalam segala pengetahuan dan kemampuan serta keyakinan dituntut untuk dapat memberikan putusan yang terbaik, baik itu untuk pihak korban maupun terdakwa.

Menurut penulis, putusan yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir khususnya terhadap kasus perkosaan yang penulis jadikan sampel tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, karena tidak sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia adalah :

1. Sumber hukum adalah undang-undang dan bukan hakim, jadi putusan hakim harus semata-mata karena undang-undang.
2. Tugas seorang hakim hanyalah menentukan apakah seseorang bersalah
3. Menghukum adalah merupakan hak Negara dan hak itu diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu.

Berdasarkan wawancara penulis terhadap terdakwa di Rumah Tahanan Bagan Siapi-api Tanggal 26 Januari sampai dengan Tanggal 29 Januari 2010, dapat disimpulkan bahwasannya hakim tidak menganalisa lebih dalam dari berkas acara pidana, dimana tuntutan yang di berikan kepada pelaku tidak sesuai dengan fakta dan hakim telah melanggar pasal 56 ayat 1 KUHAP yang berbunyi :

“ Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka”.

Yang secara jelas disampaikan pelaku perkosaan bahwasannya tidak ada pemberitahuan tetang hal yang demikian. Selanjutnya penulis menemukan hasil *visum et repertum* yang tidak sesuai dengan kondisi korban, serta adanya intimidasi terhadap pelaku saat terjadinya penyidikan di kepolisian Polres Rokan Hilir sehingga keterangan yang diberikan pelaku bukanlah hal yang sebenarnya, disini ada kemungkinan rekayasa terhadap berkas acara pidana. Jadi putusan yang dijatuhkan oleh hakim pengadilan negeri Rokan Hilir sangat tidak hati-hati dan tidak memjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Dari unsur korban, putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sangatlah merugikan pada korban kejahatan perkosaan. Dilihat

dari dampak yang ditimbulkan dari kejahatan kesusilaan tersebut para korban secara langsung atau tidak langsung ada yang mengalami stress maupun rasa sakit pada fisik dan beban mental bagi korban bisa juga menjadi trauma berkepanjangan baik terhadap lawan jenis, pada tempat – tempat tertentu, bentuk bentuk pekerjaan yang pada situasi kondisi dimana korban mengalami peristiwa kejahatan tersebut.

Bila ditinjau dari segi hukum Islam, terutama mengenai putusan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam menyelesaikan perkara tindak pidana perkosaan memberikan hukuman yang pada prinsipnya tidak efektif. Sebab dalam pidana Islam tujuan dari hukuman adalah pencegahan (Ar-Ra,du Wazzajru) , pengajaran dan pendidikan<sup>29</sup>. Pencegahan adalah menahan pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali serta tidak terus menerus melakukan perbuatannya, disamping penjegahan terhadap orang lain, oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besar kecilnya hukuman itu harus sedemikian rupa yang cukup mewujudkan tujuan tersebut, tidak boleh lebih atau kurang dari batas yang telah ditentukan dan dengan demikian terdapat prinsip keadilan menjatuhkan hukuman.

Dengan demikian hukuman yang diberikan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tidaklah sesuai dengan hukum Islam, dikatakan demikian karena tujuan hukuman dalam hukum Islam adalah untuk keadilan dan kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 135.

---

<sup>29</sup> Ahmad Hanafi, *Op.cit.* Hal 255.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
 ءُؤَا أَوْ تُلَوِّاْلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ  
 تَغَرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan ayat tersebut diatas, dapat diketahui bahwa penerapan pasal

285 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam

karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”,<sup>30</sup>

Berdasarkan pasal tersebut hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang tidak seluruhnya dari kasus tersebut menjatuhkan hukuman maksimal, merupakan sikap yang tidak dibenarkan menurut islam.

Bila ditinjau dari segi hukum pidana Islam, maka putusan hakim tersebut tidak mencerminkan suatu keadilan dan kemaslahatan. Karena dalam pidana Islam tidak mengenal putusan atau hukuman yang berlaku surut, kecuali dalam dua hal, yakni jika hukuman itu membahayakan bagi sipelaku pidana serta hukuman itu dapat mencegah kejahatan, seperti halnya naik banding yang dilakukan karena putusan hakim tidak sesuai dengan kenyataan. Maksudnya ialah untuk menjegah kejahatan dan kemudhorotan sesuai dengan tujuan pembentukan hukum dalam syari’at Islam.

---

<sup>30</sup> R. Soenarto Soedbroto, *Loc.cit.*

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka dapat penulis ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan hal yang cukup sering terjadi baik di kantor, di rumah, di jalanan bahkan di tempat-tempat keramaian. Kejahatan ini tidak saja terjadi pada kaum wanita dewasa bahkan telah mewabah sampai pada anak-anak di bawah umur.
2. Bila dilihat dampak dari perkosaan, pada hakekatnya cukup luas, secara psikologi korban menjadi orang yang tertutup dari dunia luar, lebih suka menyendiri, dan trauma yang berkepanjangan. Mereka masih muda masa depannya masih panjang , tetapi hanya dengan suatu peristiwa yang dialaminya semangat hidupnya menjadi redup seketika. Perasaan tidak berguna, kotor, hina, selalu saja menghantuinya.
3. Dalam ilmu kriminologi terdapat beberapa konsep tentang factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan antara lain : faktor yang berasal dari lingkungan keluarga, sosial, budaya, kelainan seks, kenakalan remaja, serta putusan hakim yang tidak tegas.
4. Bila ditinjau dari segi hukum Islam, putusan hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam pidana perkosaan memberikan hukuman yang pada prinsipnya tidak efektif. Sebab dalam pidana Islam tujuan dari hukuman

adalah pencegahan, pengajaran dan pendidikan. Oleh karena tujuan hukuman adalah pencegahan, maka besar kecilnya hukuman itu harus sedemikian rupa, tidak boleh lebih atau kurang dari batas yang telah ditentukan dan dengan demikian terdapat prinsip keadilan menjatuhkan hukuman

## **B. Saran**

Adapun saran-saran yang dapat penulis kemukakan disini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mnghindari terjadinya kejahatan tindak pidana perkosaan atau setidak-tidaknya mempersempit terjadinya perbuatan tersebut, peranan orang tua, masyarakat umum, lembaga penegak keadilan dan pemerintahan ikut serta dalam menanggulangnya.
2. Dalam proses pemeriksaan suatu putusan perkara hendaknya penyidik, jaksa penuntut umum, maupun majelis hakim yang berwenang memeriksa dan menggali perkara terutama tentang tindak pidana perkosaan, harus lebih mendalami pasa-pasal yang dilanggar dan perlu dibuktikan oleh perbuatan terdakwa.
3. Kepada hakim dalam hal ini diharapkan mampu memberikan hukuman yang sesuai dengan undang-undang tanpa melihat siapa pelakunya, baik dari suku, keturunan , dan jabatan.
4. Dalam skripsi ini penulis mengakui bahwa banyak kekurangan-kekurangan, oleh sebab itu diharapkan kritik dan saran dari pembaca agar skripsi ini lebih sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Amani 2005).

Al-Kasani, Mas'ud, Ibn, *Bada'i Alsana'i, Juz VII*, (Bairut, Dar Al-Kutub Al-Almiyyah, 1992).

As-Sayyid, Bin, Salim, Malik, Abu, Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta, Pustaka Azzam, 2007), Jilid 3.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).

Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir dalam angka 2008

Cholis, Nashir, M. *Fiqih Jinayat (Pidana Islam)*. (Pekanbaru: Susqa Pers, 2000)

Ghazawi, Adam, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang 1990).

Mujib, Abdul, Muhammad, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta:Pustaka Firdaus, 1994 ) Cet. Ke-1,

Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prefensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).

Prodjodikoro,Wiryono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, (Bandung: Erasco, 1980).

RI, Agama, Departemen, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

Rosyada, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993) Cet.1.

Sabiq, Sayit, *Fikih Sunnah, Terjemahan Moh. Nabban Husein*, (Bandung: Al-Ma'rifat, 1996), Jilid 9.

Saleh, Hasan, H.E. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Saleh, Roeslan, *Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan Dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 2005).

Soerodibroto, Soenarto, *KUHP Dan KUHP* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).

Tarigan, Anny, *Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, ( Jakarta: Derap Warapsari, 2003).

Wadong, Hasan, Maulana, *Kejahatan Warungan Dan Kejahatan Kaporasi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997).

Widiayanti, Ninik dan Anorega, Panji, *Perkembangan Kejahatan Dan Masalahnya Ditinjau Dari Segi Kriminologis Dan Sosial*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987).

## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN KASAT RESKRIM POLSEK BANGKO PUSAKO**

1. Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah kejahatan perkosaan?
2. Apakah pihak kepolisian pernah mengalami keterlambatan dalam menangani kasus perkosaan / asusila?
3. Bagaimana pendapat bapak dengan laporan yang dilakukan korban kepada pihak kepolisian serta apa pula akibat dari pelaporan korban yang terkesan lambat ?
4. Sejauh perkara pemerkosaan yang ada apakah korban langsung melaporkannya pada waktu setelah kejadian atau beberapa hari setelah kejadian tersebut ?
5. Bagaimana usaha atau cara bapak dalam mensosialisasikan pencegahan untuk meminimalisir kejahatan di wilayah bapak ?
6. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan hukuman yang diberikan oleh hakim ?
7. Apakah putusan yang diberikan oleh hakim sesuai dengan kitab undang – undang hukum pidana pada pasal 285 bahwasannya pelaku pemerkosaan diancam pidana maksimal 15 tahun ?
8. Menurut bapak, apakah hukuman yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan mampu menimbulkan rasa efek jera ?

## **DAFTAR WAWANCARA DENGAN TIM PENYIDIK POLSEK BANGKO PUSAKO**

1. Bagaimanakah proses dalam penerimaan laporan tindak pidana perkosaan yang terjadi ?
2. Apakah ada tempat khusus dalam penerimaan laporan tindak pidana kesusilaan tersebut ?
3. Apakah yang membuat korban tidak berdaya untuk mempertahankan dirinya dari pelaku pemerkosaan?
4. Apakah ada faktor yang mempengaruhi dari korban untuk terjadinya kejahatan pemerkosaan?
5. Apakah ada modus tertentu dari pelaku untuk menguasai korbannya?
6. Bagaimana pendapat bapak dengan laporan yang dilakukan korban terhadap pihak kepolisian serta apa pula akibat dari pelaporan korban yang terkesan lambat?
7. Sejauh perkara pemerkosaan yang ada apakah korban langsung melaporkannya pada waktu setelah kejadian atau beberapa hari setelah kejadian tersebut ?
8. Apakah yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah kejahatan perkosaan?
9. Apakah pihak kepolisian pernah mengalami keterlambatan dalam menangani kasus perkosaan / asusila?
10. Apakah dari kepolisian sering mengadakan razia terhadap tempat – tempat yang mengundang maksiat ?

## BI0GRAFI



Andi Surya Winata, Lahir di Simalungun Kecamatan Pematang Siantar Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 09 September 1985 dari sepasang suami istri Trisno Siswadi dan Siti Nur Amsyah (Alm). Anak ke empat dari lima bersaudara.

Pendidikan formal SD 075 Bangko Sempurna Kecamtan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan menerus pendidikan ke Pondok Pesantren Nurul Islam Bagan Sinembah Rokan Hilir. Dan setelah itu meneruskan ke jenjang perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum dengan Jurusan Siyasah Jinayah (JS) Strata SI.

Pada tahun 2009/2010 telah dapat menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan judul karya ilmiah **”Kasus Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumnya ( Studi Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam )** dengan Indeks Prestasi sangat memuaskan.

Darmawan Tia Indrajaya M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri  
Sulatan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas  
Lamp : -  
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr.  
**Andi Surya Winata**

Pekanbaru 17 Maret 2010  
Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum  
UIN SUSKA RIAU  
Di-

Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Wr, Wb*

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sdr. Andi Surya Winata yang berjudul "**Kasus Pemerkosaan Dan Sanksi Hukumnya ( Studi Di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Dalam Perspektif Hukum Islam )**", telah dapat diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut di atas dapat dipanggil untuk ujian dalam sidang munaqasyah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikianlah harapan kami, semoga skripsi ini dapat dipergunakan seperlunya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wasslam*

Pembimbing,

Darmawan Tia Indrajaya M.Ag  
Nip : 150 368 313



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

كلية الشريعة و القانون  
FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN**

Skripsi ini berjudul: *“Kasus Pemerkosaan dan Sanksi Hukumnya ( Studi di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam Perspektif Hukum Islam”*, yang di tulis oleh :

Nama : ANDI SURYA WANATA  
Nim : 10524001116  
Jurusan : Siyasah Jinayah

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian Sarjana Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang dilaksanakan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 2 Juni 2010  
Bertepatan : 12 Jumadil Akhir 1431 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI).

Pekanbaru, 12 Juli 2010  
Dekan

**PROF. DR. H. MAHDINI, MA**  
**NIP. 19610 3131 98603 1 002**

**PANITIA UJIAN SARJANA**

Ketua

Sekretaris

**DRS. HAJAR M, MH**  
**NIP. 150 228 112**

**DRA. HERTINA, M.Pd**  
**NIP. 19680629 199402 2 002**

Penguji I

Penguji II

**DR. AKBARIZAN, M.Ag, M.Pd**  
**NIP. 19711001 199503 1 002**

**M. ABDI ALMAKTSUR, MA**  
**NIP. 19720701 199803 1 003**